

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTABANDARLAMPUNG
TA. 2023**





KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh DISKOMINFO selama Tahun 2022. Dengan laporan ini DISKOMINFO akan mengambil berbagai langkah strategis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya untuk semakin memperkuat perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dalam kerangka BandarLampung Sehat, Cerdas,Beriman,Berbudaya,Nyaman,Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good service*. Hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Melalui LAKIP DISKOMINFO Kota Bandar Lampung Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja DISKOMINFO Kota Bandar Lampung dalam periode 2021-2026. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kota Bandar Lampung.

BandarLampung,

2023

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKAS DAN
INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**ANDY. S.SOS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740204 199703 1 004**



IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP DISKOMINFO Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DISKOMINFO Kota Bandar Lampung.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Semua sasaran strategis DISKOMINFO Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 pencapaiannya adalah baik. Namun demikian, keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis. Beberapa tantangan yang dihadapi DISKOMINFO dalam pencapaian tujuan dan sasaran DISKOMINFO diantaranya adalah tantangan keberhasilan pembangunan yang sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan DISKOMINFO Kota Bandar Lampung masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas dan kualitas.



Tantangan lainnya dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya pelaksanaan *smart city*, termasuk fasilitasi *smart city* daerah yang dilaksanakan oleh DISKOMINFO. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan aktifitas dan kualitas pelaksanaan *smart city* di Kota Bandar Lampung. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan DISKOMINFO Kota Bandar Lampung ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses *smart city* secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kota Bandar Lampung.

Hasil evaluasi capaian kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sangat penting dipergunakan sebagai pijakan bagi DISKOMINFO Kota Bandar Lampung dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang. Sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan ini yaitu dapat mendorong DISKOMINFO untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan baik sehingga DISKOMINFO dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. DASAR HUKUM	I-4
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	I-6
D. STRUKTUR ORGANISASI	I-8
E. SUMBER DAYA MANUSIA	I-41
F. SARANA DAN PRASARANA	I-44
G. SUMBER DAYA KEUANGAN	I-44
H. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	I-56
I. RUANG LINGKUP	I-57
J. SISTEMATIKA PENYAJIAN	I-57
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. RENCANA STRATEGIS	II-1
B. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA	II-36
C. PROGRAM DAN KEGIATAN	II-41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-1
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS	III-23



BAB IV PENUTUP	IV-1
A.KESIMPULAN	IV-1
B. SARAN	IV-2
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Selain itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Presiden tersebut pada pasal 13 menyebutkan bahwa pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga dan OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan OPD. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 yang ditindak lanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan kinerjanya.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan dari pelaporan kinerja instansi pemerintah adalah (1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai dan (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kerjanya.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Organisasi Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung;

Oleh sebab itu, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
9. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023;
11. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandar Lampung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung; Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok ini Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi Informasi Publik, Pemberdayaan Telematika, Pos dan Telekomunikasi, Pengembangan Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta Masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Pengoordinasian Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
6. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Tugas dan Fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang meliputi:

1. Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja yang direncanakan (target) dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan Tabel Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK).
2. Analisis pencapaian kinerja menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja unit kerja, menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan dan hambatan/ kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dalam hal ini dapat dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan tersebut.
3. Aspek keuangan menguraikan sumber perolehan dan penggunaan dana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Aspek keuangan harus memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung telah membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Bandar Lampung sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi strategis untuk dapat menyandingkan pendayagunaan *Comprehensive Information Database* tersebut dengan berperannya masyarakat informasi di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, Susunan Organisasi Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. JF Perencana.
 - c. Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik, membawahi:
 1. JF Pranata Hubungan Masyarakat;
 2. JF Pranata Hubungan Masyarakat;
 3. JF Pranata Hubungan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan E-Government
 1. JF Pranata Komputer;
 2. JF Pranata Komputer;
 3. JF Pranata Komputer.

- e. Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
 - 1. JF Sandiman;
 - 2. JF Sandiman;
 - 3. JF Sandiman.
- f. Bidang Statistik dan Data Elektronik, membawahi:
 - 1. JFS tatistisi;
 - 2. JF Statistisi;
 - 3. JF Statistisi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

1. Gambaran Singkat, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, Susunan Organisasi Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung adalah pelaksana sebagian Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan sebuah OPD di lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertugas untuk melakukan **PROSES KOMUNIKASI** dan menerapkan **DISIPLIN INFORMATIKA** dalam hal penyelenggaraan tata kerja pemerintah Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan hubungannya dengan Kepemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian dlsb) serta dengan Masyarakat (Publik, Dunia Usaha, Media Massa dlsb).

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika beserta tupoksinya adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya meliputi teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Pemberdayaan E-Government, Persandian, keamanan informasi dan siber,serta Data dan Statistik;
 - b. Merumuskan rencana strategis dinas dengan mengacu pada rencana strategis pemerintahan Kota Bandar Lampung untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Pemberdayaan E-Government, Persandian, kemananan informasi dan siber, serta Data dan Statistik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Merumuskan program dan kegiatan dinas dengan menjabarkan dalam rencana program dan kegiatan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif;
 - d. Menetapkan rencana kinerja tahunan dinas melalui rumusan, sasaran indikator serta anggaran agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Memverifikasi rencana operasional kegiatan dinas sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran

agar pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun operasional berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan;

- f. Mengkoordinasikan, membina dan memberi petunjuk pelaksanaan kerja tatalaksana pemerintahan dan administrasi pelaksanaan publik serta reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku guna meningkatkan produktifitas kerja;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup kota, kontenlintas sectoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi melalui pertemuan dan rapat agar dihasilkan rumusan struktur dan organisasi dan tata kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menetapkan kebijakan pengembangan kinerja melalui pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, evaluasi pengembangan kinerja dan menyusun rencana strategis (Renstra) serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas, guna peningkatan produktivitas dan pengembangan kinerja pemerintah kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengarahkan usulan layanan infrastruktur data center, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan penyiaran dan informasi publik dinas dan badan berdasarkan usulan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- j. Melaporkan akuntabilitas kinerja dinas melalui laporan akuntabilitas kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Memberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

sesuai dengan lingkup tugasnya;

- l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - m. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota, antar lembaga/instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi Penyusunan Program dan Informasi, Urusan Umum dan Kepegawaian, serta Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan program dan kerja sekretariat dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan;
 - c. Pengelolaan urusan perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan asset;
 - d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di sekretariat dinas sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - e. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sekretariat dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- f. Penyelia pelaksanaan tugas bawahan di sekretariat dinas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g. Merumuskan penetapan rencana pelaksanaan kegiatan sekretariat dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- h. Memfasilitasi kegiatan sekretariat dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- i. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di sekretariat dinas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa depan;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat dinas sesuai tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja di sekretariat dinas;
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas.

Sekretariat dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. JF Perencana.
- d. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- e. Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan analisis jabatan/analisis beban kerja/rencana redistribusi pegawai/proyeksi pegawai lima tahun dan petajabatan aparatur sipil negara;
- c. Menyusun dokumen analisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;
- d. Menyusun rancangan dan pengembangan instrument, materi dan validasi uji kompetensi pengisian jabatan, pengembangan karier, promosi, mutasi serta penugasan aparatur sipil negara;
- e. Melaksanakan analisis dan evaluasi kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara;
- f. Menyusun rencana pengembangan individu pegawai (individual development plan);
- g. Menyusun dokumen pengelolaan kinerja aparatur sipil negara;
- h. Menyusun instrument pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai;
- i. Menyusun dokumen penilaian SKP;
- j. Menyusun dokumen analisis disiplin, pemberhentian, penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara
- k. Menyusun analisis sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara
- l. Menyusun dokumen analisis proses cuti, proses jaminan pension dan jaminan hari tua aparatur sipil negara

- m. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian jabatan fungsional;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan Umum dan Kepegawaian;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan perjalanan dinas;
- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Menyusun laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Menyusun laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait Belanja Daerah;
- e. Menyusun laporan pengolahan dan analisis data, laporan rekomendasi, dan laporan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
- f. Menyusun laporan pengolahan dan analisis data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
- g. Melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan aset;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

JF Perencana mempunyai tugas :

- a. Memformulasikan sajian untuk analisis rencana kerja dinas;
- b. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan rencana kerja dinas;
- c. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana kerja dinas;
- d. Menyusun dan menguji alternatif kriteria dan model hubungan kausal dinas;
- e. Menghimpun, menyusun dan menganalisis perencanaan kebijakan strategi jangka pendek dan jangka menengah dinas;
- f. Menghimpun, menyusun dan menganalisis perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral maupun regional dinas;
- g. Menghimpun, menyusun dan menganalisis rancangan rencana anggaran, informasi dan pembiayaan pembangunan kerja dinas;
- h. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggarandan informasi dinas dengan mitra legislatif;
- i. Mengendalikan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dinas;
- j. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait penyusunan, dan analisis program dan pembiayaan pembangunan dan evaluasi kerja dinas
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di bidang Informasi Dan Komunikasi Publik.

Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Informasi Dan Komunikasi Publik;
- b. menyusun program, mengevaluasi pelaksanaan dan model pelayanan informasi dan kehumasan;
- c. menganalisis konten media terpilih dan isupublik;
- d. memberikan konsultasi, advokasi, atau negosiasi pada pelayanan informasi dan kehumasan
- e. mengevaluasi penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya, atau pertemuan sejenis internasional
- f. menyusun konsep pengembangan system dan strategi pelayanan informasi dan kehumasan;
- g. mengembangkan standar dan system layanan informasi dan kehumasan;
- h. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Informasi Dan Komunikasi Publik;
- i. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik;
- k. Mengelola Laporan Masyarakat melalui SP4N LAPOR
- l. Pelaksanaantugaslainyangdiberikanatasan.

Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik dibantu oleh:

- a. JF Pranata Hubungan Masyarakat;
- b. JF Pranata Hubungan Masyarakat;
- c. JFPranata Hubungan Masyarakat.

JF Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan informasi dibidang
- b. Mengikuti rapat pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan kehumasan;
- c. Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan;
- d. Mengolah isu public dan memberikan pelayanan informasi dalam bentuk ceramah, presentasi, dan pidato;
- e. Melaksanakan tugas sebagai nara sumber dalam forum konsultasi pelayanan informasi dan kehumasan;,,
- f. Mengolah isu hubungan internal dan membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat program,rutin,berkala;
- g. mengevaluasi model layanan informasi public untuk PPID Kota Bandar Lampung;
- h. Mengelola pengaduan dari masyarakat melalui system pengaduan SP4N LAPOR;
- i. Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pelayanan informasi PPID Kota Bandar Lampung;
- j. Melaksanakan tugas sebagai pemandu acara(master of ceremony);
- k. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan;
- l. Menelaah bahan untuk penyelesaian sengketa informasi dan kehumasan;
- m. Menyusun konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan;
- n. Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga/instansi terkait pengelolaan dan pengolahan informasi dan kehumasan;

- o. Mengevaluasi pelaksanaan advokasi hubungan kelembagaan;
- p. mengolah data, menganalisa data dan Menyusun laporan dalam rangka audit komunikasi;
- q. mengidentifikasi kasus atau masalah komunikasi;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

JF Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan hubungan kemitraan, kelompok informasi masyarakat, pertunjukan rakyat;
- b. Mengikuti rapat pimpinan, kunjungan kerja atau acara seremonial pimpinan untuk kelompok informasi masyarakat, pertunjukan rakyat, desiminasi media
- c. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan kelompok informasi Masyarakat (KIM) dan Perbedayaan Pertunjukkan Rakyat (Petunra);
- d. Menyelenggarakan Talk Show dan seminar pelayanan informasi dan kehumasan;
- e. Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan hubungan kemitraan publik dan kehumasan;
- f. Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam forum konsultasi pelayanan informasi untuk kelompok Informasi masyarakat dan kelompok pemberdayaan pertunjukan rakyat;
- g. Monitoring pembinaan hubungan kemitraan dgn lembaga penyiaran, pertelevisian, kelompok informasi masyarakat, kelompok pertunjukan rakyat
- h. Mengevaluasi seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan hubungan kemitraan publik dan kehumasan;
- i. Melaksanakan kegiatan kunjungan kemitraan di Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Perbedayaan Pertunjukkan Rakyat (Petunra);
- j. Melaksanakan tugas sebagai pemandu acara (master of ceremony)

dan moderator dalam kegiatan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan pertunjukan Rakyat;

- k. Mengevaluasi pelaksanaan advokasi hubungan kelembagaan dengan lembaga penyiaran;
- l. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan hubungan dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Perbedayaan Pertunjukkan Rakyat (Petunra);
- m. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan hubungan eksternal dengan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Perbedayaan Pertunjukkan Rakyat (Petunra);
- n. Mengidentifikasi kasus atau masalah dalam diseminasi informasi terkait kemitraan;
- o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pelaksanaan kemitraan komunikasi; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

JF Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan informasi untuk publikasi di media cetak, elektronik, media sosial, media luar ruang dan media digital;
- b. Menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media cetak, elektronik, dan daring (online), sebagai anggota dewan redaksi;
- c. Melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab teknis dalam kegiatan teleconference, talkshow, prescompres untuk publikasi dengan media cetak, media elektronik, media sosial;
- d. Mengikuti rapat pimpinan, kunjungan kerja atau acara seremonial pimpinan untuk publikasi;

- e. Melaksanakan tugas sebagai nara sumber dalam forum konsultasi pengelolaan media informasi publik milik Pemerintah Kota;
- f. Melaksanakan pelayanan informasi publik, penyiapan materi mengolah materi untuk publikasi di media publik;
- g. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan media informasi public;
- h. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan membuat laporan kegiatan pengelolaan media publik dilingkup pemerintah kota;
- i. Melaksanakan kegiatan kunjungan jurnalistik sebagai peserta;
- j. Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pengelolaan media publik sebagai peserta atau moderator;
- k. Melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab teknis dalam kegiatan teleconference yang berkaitan dengan media informasi publik;
- l. Mengevaluasi penyelenggaraan konferensipers, seminar, lokakarya, atau pertemuan sejenis nasional;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan hubungan eksternal dan internal;
- n. Monitoring dan mengolah isu publik di media publik, media publik elektronik, cetak dan media sosial;
- o. Menyusun konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan;
- p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pengelolaan media public;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(5) Kepala Bidang Pemberdayaan E-Government

Bidang Pemberdayaan E-Government mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di bidang Pemberdayaan E-Government.

Bidang Pemberdayaan E-Government mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan E-Government;
- b. Melakukan analisis dampak teknologi informasi yang digunakan institusi saat ini dan trennya terhadap perubahan strategi pemerintah;
- c. menyusun dan mengkaji kerangka kerja untuk penyusunan strategi teknologi informasi;
- d. melakukan analisis kesenjangan dan roadmap terhadap komponen enterprise architecture;
- e. menyusun dan mengkaji tata kelola teknologi informasi;
- f. menyusun pola acuan (template) untuk strategi operasional dan mengkaji kelayakan implementasi rencana teknologi informasi;
- g. menyusun standard operational procedure untuk kegiatan information technology service management
- h. melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi ketersediaan layanan teknologi informasi
- i. menyusun kebijakan data, standar data, atau prosedur pengelolaan data
- j. menyusun arsitektur integrasi data, standar metadata dan kebijakan keamanan data
- k. melakukan analisis data dan evaluasi audit teknologi informasi;
- l. Melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pemberdayaan E-Government;

- m. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian pemberdayaan E-Government;
- n. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pemberdayaan E-Government;
- o. Perancangan, pengembangan dan pemberdayaan E-Government dalam rangka mewujudkan terciptanya ekosistem Kota Cerdas Bandar Lampung (SmartCity Bandar Lampung);
- p. Melaksanakan Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pemberdayaan E-Government dibantu oleh:

- a. JF Pranata Komputer;
- b. JF Pranata Komputer;
- c. JF Pranata Komputer.

Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

JF Pranata Komputer mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana backup, pemulihan data dan kebutuhan teknologi data;
- b. Melakukan implementasi data mining;
- c. Menyusun kebutuhan atau standar keamanan data dan definisi kontrol atau prosedur keamanan data;
- d. Melakukan analisis perilaku akses pengguna;
- e. Menyusun kerangka acuan kerja;
- f. Menyusun usulan pembangunan sistem informasi;
- g. Menyusun rencana dan melakukan studi kelayakan sistem informasi;

- h. Melakukan identifikasi kebutuhan pengguna sistem informasi;;
- i. membangun dan mengembangkan layanan system informasi berbasis elektronik untuk layanan dasar pemerintahan, publik, layanan bisnis dan UMKM;
- j. melakukan analisis dan pemodelan proses sistem informasi;
- k. membuat algoritma pemrograman;
- l. menyusun definisi rule validasi pada program aplikasi sistem informasi;
- m. menyusun skenario uji coba sistem informasi;
- n. melakukan pemeriksaan dan analisis hasil uji coba sistem informasi;
- o. melakukan pemantauan (monitoring) kinerja aplikasi sistem informasi di lingkungan instansi;
- p. melakukan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pemberdayaan aplikasi informatika;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

JF Pranata Komputer mempunyai tugas :

- a. merumuskan masterplan pelaksanaan dan tata Kelola e-government yang berkesinambungan
- b. menyusun rekomendasi persetujuan arsitektur data;
- c. menyusun rencana kegiatan layanan pengelolaan data;
- d. melakukan supervisi terhadap organisasi dan staf pengelola data;
- e. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pengembangan ekosistem Kota Cerdas Bandar Lampung (Smart City Bandar Lampung);
- f. Melaksanakan Tata Kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data;
- h. Menyusun bahan sosialisasi tentang pengelolaan data;

- i. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan data;
- j. Melakukan dan menyusun analisis model data instansi;
- k. Menyusun arsitektur teknologi data;
- l. Melakukan perancangan data model dan business intelligence;
- m. Melakukan analisis kebutuhan informasi;
- n. Menyusun prosedur pengujian rancangan layanan akses data;
- o. Melakukan perancangan integrasi data;
- p. Melakukan evaluasi hasil pengujian rancangan integrasi data;
- q. Menyusun prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi;
- r. Melakukan review dokumen manajemen risiko;
- s. Melakukan pengukuran risiko;
- t. Menyusun solusi teknis penanganan risiko;
- u. Menyusun kerangka acuan kerja;
- v. Menyusun rencana dan melakukan studi kelayakan untuk pengolahan data;
- w. Menyusun prosedur, petunjuk teknis pelaksanaan, pemantauan (monitoring), dan evaluasi pengolahan data;
- x. Melakukan analisis data spasial; dan
- y. Menyusun skenario uji coba program multimedia;
- z. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga terkait pemberdayaan e-government;
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

JF Pranata Komputer mempunyai tugas :

- a. Membangun dan mengembangkan pusat data (data center) dan command center;
- b. Melakukan pengukuran performa teknologi informasi;
- c. Menyusun rencana pembiayaan teknologi informasi dan strategi operasional rencana teknologi informasi;

- d. Mengelola kebutuhan layanan teknologi informasi;
- e. menyusun dan mengelola portofolio layanan teknologi informasi;
- f. mengelola penyedia jasa atau barang dan kapasitas layanan internet dan intranet di lingkup pemerintah kota;
- g. menyusun perencanaan transisi layanan teknologi informasi;
- h. mengelola perubahan layanan teknologi informasi, asset, konfigurasi dan pengetahuan layanan teknologi informasi;
- i. melakukan validasi, pengujian, dan evaluasi layanan teknologi informasi;
- j. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
- k. Melaksanakan kewenangan pemberian rekomendasi
- l. Mengelolaprilis dan deploymen tlayanan teknologi informasi serta event dan insiden kegiatan teknologi informasi;
- m. Melakukan analisis awal, pengujian, verifikasi, atau validasi untuk kebutuhan audit teknologi informasi, kebutuhan pengguna sistem jaringan komputer kompleks, serta analisis kondisi sistem jaringan komputer kompleks yang sedang berjalan;
- n. Membuat rancangan logis (logical design) dan rancangan fisik (physical design) sistem jaringan komputer;
- o. Menyusun rancangan dan evaluasi uji coba sistem jaringan komputer kompleks;
- p. Melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (monitoring) jaringan;
- q. Menyusun prosedur keamanan jaringan dan petunjuk teknis sistem jaringan komputer dan keamanan jaringan;
- r. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan jaringan;
- s. Menyusun rencana pengoperasian infrastruktur teknologi informasi;
- t. Menyusun kerangkaacuan kerja;
- u. Melakukan evaluasi proposal teknis penyedia barang atau jasa

- infrastruktur teknologi informasi;
- v. Menyusun rencana pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi infrastruktur teknologi informasi;
- w. Melakukan analisis permasalahan dari hasil pemantauan (monitoring) kinerja infrastruktur teknologi informasi;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(6) Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informas dan Siber

Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber.

Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- b. Melakukan analisis tren Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- c. Melakukan kajian kebijakan Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- d. Melakukan evaluasi norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) di bidang Persandian,Keamanan Informasi dan Siber;
- e. Melakukan evaluasi penanggulangan dan pemulihan insiden Persandian, keamanan Informasi dan Siber;
- f. Melakukan evaluasi implementasi Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- g. Mendesain algoritma kriptografi, manajemen kunci kriptografi, dan protokol kriptografi;
- h. Melakukan pengkajian aspek kriptografis/ manajemen kunci perangkat Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;

- i. Melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang persandian, Keamanan Siber dan Keamanan Informasi;
- j. Penentuan standar Persandian, Keamanan Informasi dan Siber dilingkup Pemerintah Kota;
- k. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Persandian, Keamanan Informasi dan Siber;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait Persandian, Keamanan Informasi dan Siber
- m. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan atasan.

Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber dibantu oleh :

- a. JF Sandiman;
- b. JF Sandiman;
- c. JF Sandiman.

Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Ahli Muda yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

JF Persandian Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang persandian;
- b. Melakukan penyusunan Instrumen persandian;
- c. Melakukan supervisi audit/penilaian persandian;
- d. Melakukan penilaian persandian;
- e. Melakukan audit persandian;
- f. Melakukan analisis kebutuhan persandian;
- g. Melakukan penyusunan program pembinaan komunitas dibidang persandian;

- h. Melakukanan alisis insiden persandian;
- i. Melakukan penanggulangan insiden persandian;
- j. Melakukan pemulihan insiden persandian;
- k. Melakukan penyusunan rekomendasi penanganan kerentanan persandian;
- l. Melakukan investigasi persandian;
- m. Melakukan investigasi penyelenggaraan persandian dan sumberdaya persandian;
- n. Melakukan analisis strategis pola ancaman persandian;
- o. Melakukan perumusan spesifikasi teknis perangkat persandian;
- p. Melakukan implementasi desain persandian;
- q. Melakukan pengujian perangkat persandian;
- r. Melakukan pengujian algoritma kriptografi dan steganografi;
- s. Melakukan pengujian prototipe kunci kriptografi;
- t. Melakukan analisis kekuatan perangkat persandian;
- u. Melakukan mitigasi insiden persandian;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

JF Sandiman mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang keamanan informasi;
- b. Melakukan penyusunan Instrumen keamanan informasi;
- c. Melakukan supervisi audit/penilaian keamanan informasi;
- d. Melakukan penilaian keamanan informasi;
- e. melakukan penilaian informasi;
- f. melakukan audit keamanan informasi;
- g. melakukan analisis kebutuhan keamanan informasi;
- h. melakukan penyusunan program pembinaan komunitas dibidang keamanan informasi;

- i. melakukan analisis insiden keamanan informasi;
- j. melakukan penanggulangan insiden keamanan informasi;
- k. melakukan pemulihan insiden keamanan informasi;
- l. melakukan penyusunan rekomendasi penanganan kerentanan keamanan informasi;
- m. melakukan investigasi keamanan informasi;
- n. melakukan analisis sumber bukti digital dan informasi lainnya dalam rangka forensik digital;
- o. melakukan analisis malware;
- p. melakukan pengujian (proof of concept) eksploitasi celah keamanan sistem informasi;
- q. melakukan analisis strategis pola ancaman keamanan informasi;
- r. melakukan analisis hasil pengumpulan data intelijen (intelligence information gathering);
- s. melakukan perumusan spesifikasi teknis perangkat keamanan informasi;
- t. melakukan implementasi desain perangkat keamanan informasi;
- u. melakukan pengujian perangkat keamanan informasi;
- v. melakukan uji kesesuaian keamanan modul kriptografi, dan perangkat teknologi informasi;
- w. melakukan analisis kekuatan perangkat keamanan informasi;
- x. melakukan mitigasi insiden keamanan informasi;
- y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang keamanan siber;
- b. Melakukan penyusunan Instrumen keamanan siber;
- c. Melakukan supervisi audit/penilaian keamanan siber;

- d. Melakukan penilaian keamanan siber;
- e. Melakukan audit keamanan siber;
- f. Melakukan analisis kebutuhan keamanan siber;
- g. Melakukan penyusunan program pembinaan komunitas dibidang keamanan siber;
- h. Melakukan analisis insiden keamanan siber;
- i. Melakukan penanggulangan insiden keamanan siber;
- j. Melakukan pemulihan insiden keamanan siber;
- k. Melakukan penyusunan rekomendasi penanganan kerentanan keamanan siber;
- l. Melakukan investigasi keamanan siber;
- m. Melakukan analisis strategis pola ancaman keamanan siber;
- n. Melakukan perumusan spesifikasi teknis perangkat keamanan siber;;
- o. Melakukan implementasi desain perangkat keamanan siber;
- p. Melakukan pengujian perangkat keamanan siber;
- q. Melakukan analisis kekuatan perangkat keamanan siber;
- r. Melakukan mitigasi insiden keamanan siber;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(7) Kepala Bidang Statistik

Bidang Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota di bidang Bidang Data dan Statistik;

Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Data dan Statistik;
- b. merancang dan membuat pedoman pengolahan kegiatan statistik

- untuk validitas data;
- c. memeriksa tabel/grafik hasil kegiatan statistik yang akan disajikan tingkat nasional;
 - d. menyusun publikasi dan ringkasan eksekutif statistik tingkat nasional;
 - e. memberikan konsultasi statistik dan menyiapkan materi pengarahan dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat khusus;
 - f. melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik khusus
 - g. memberikan bimbingan penuh kader statistisik sampai mencapai tingkat pascasarjana per orang, sebagai pembimbing utama
 - h. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang Data dan Statistik;
 - i. Pengawasan,pembinaan dan pengendalian Data dan Statistik
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar lembaga/instansi terkait Data dan Statistik;
 - k. Statistik Sektoral bidang komunikasi dan informatika;
 - l. Melaksanakan Satu Data Indonesia;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Data dan Statistik dibantuoleh :

- a. JF Statistisi;
- b. JF Satistisi;
- c. JF Statistisi.

Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Muda yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

JF Statistisi mempunyai tugas :

- a. Menelaah bahan/informasi pendukung untuk kegiatan statistik sektoral;
- b. mengumpulkan, mengolah, menyimpandanmenyajikan data statistik sektoral
- c. menyusun metode dan program pemilihan sampel pada kegiatan sampling;
- d. menghitung penimbang dalam rangka estimasi kegiatan statistik;
- e. membuat dan meneliti peta indeks kegiatan statistik;
- f. memeriksa hasil penarikan sampel kegiatan observasi berdasarkan wilayah kerja;
- g. membuat estimasi parameter dan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan statistik sektoral dan distribusi produk sistatistic sektoral;
- j. mengevaluasi pengelolaan metadata dan disimenasi statistic sektoral;
- k. penyelenggaraan pembinaan rekomendasi statistik, metadata indicator statistik dan metadata kegiatan statistik.
- l. Pelaksanaan koordinasi satu data indonesia;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

JF Statistisi mempunyai tugas :

- a. Merancang dan membuat pedoman pengolahan kegiatan statistik untuk penyuntingan dan penyandian hasil pengumpulan data;
- b. membuat program entri data dengan validasi hasil kegiatan statistik;
- c. menyusun dan menetapkan standar teknis pertukaran, penyimpanan

- dan pemberian akses data elektronik di lingkup Pemerintah Kota;
- d. melaksanakan pengendalian dan penetapan kewenangan hak akses terhadap data elektronik;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran data base antar SKPD di lingkup Pemerintah Kota
- f. memeriksa tabel/grafik database hasil kegiatan statistik yang akan disajikan tingkat provinsi;
- g. melakukan analisis data basemen dalam satu sektor;
- h. menetapkan standar penyimpanan, klasifikasi dan pemilahan data elektronik;
- i. pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan data elektronik di lingkup Pemerintah Kota
- j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pengelolaan data elektronik;
- k. Melaksanakan satu data Indonesia terkait data di Pemerintah Kota;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

JF Statistisi mempunyai tugas:

- a. Menyusun publikasi statistik tingkat provinsi;
- b. Menyusun ringkasan eksekutif tingkat provinsi;
- c. Membuat outline untuk publikasi;
- d. Mengumpulkan literatur/referensi untuk publikasi;
- e. Menelaah bahan/informasi pendukung untuk kegiatan literasi data statistik
- f. Memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat lanjutan;
- g. Menyiapkan materi pengarahan statistik tingkat lanjutan;
- h. Memberikan pengarahan statistik dalam rangkap penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat lanjutan;

- i. Melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik tingkat lanjutan
- j. membuat, menyiapkan, menyediakan dan mengumpulkan sumber literasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan dan atau pelayanan publik meliputi sumber perundangan, panduan teknis, bahan ajar elektronik, literatur digital dan atau sejenis referensi untuk publikasi
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan literasi data dan informasi dilingkup Pemerintah Kota
- l. melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pengembangan literasi data dan informasi
- m. memberikan bimbingan penuh kader statistis sampai mencapai tingkat pasca sarjana perorang, sebagai pembimbing pendamping, pembimbing utama atau penguji;
- n. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pengembangan literasi data dan informasi;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional ada yang langsung bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a) JF Analis Kebijakan
JF Analis Kebijakan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Membentuk kompetensi manajerial dalam manajemen diri dan membangun tim sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk

- kelancaran pelaksanaan tugas
2. Menelaah kembali rencana kajian dan analisis kebijakan yang sudah dibuat oleh analis kebijakan ahli pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 3. Menentukan metode kajian sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. Mengembangkan opsi/alternatif kebijakan dari data atau informasi yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Menganalisis dinamika politik dan budaya birokrasi dalam melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. Menganalisis pilihan metode sederhana dalam penilaian kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Menulis naskah rekomendasi kebijakan berdasarkan kerangka yang telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 8. Memprakarsai pelaksanaan diskusi kelompok terarah rancangan kebijakan dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan/atau kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 9. Menganalisis bidang pekerjaan dan hubungan kerja antar-instansi dalam melakukan Kajian dan Analisis Kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan antar tugas;
 10. Membangun jejaring kerja dengan internal dan eksternal organisasi tempat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- b) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis bebankerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan petajabat antar aparatur sipil negara pada dinas;
 2. menganalisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;
 3. menganalisis proses pengembangan dan pola karier aparatur sipil negara;
 4. mengevaluasi pelaksanaan promosi, mutase dan penugasan antar aparatur sipil negara
 5. mengelola sistem informasi manajemen karier aparatur sipil negara;
 6. menganalisis perangkat/ instrumen pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
 7. menyusun dan memvalidasi instrumen uji/sertifikasi kompetensi aparatur sipil negara;
 8. menganalisis kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara;
 9. menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja;
 10. mengelola dan membuat catatan kinerja pegawai;
 11. menyusun instrumen pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai dan dokumen penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 12. menyusun indikator kinerja utama (key performance indicator) dan kompetensi dalam penilaian kinerja aparatur sipil negara.

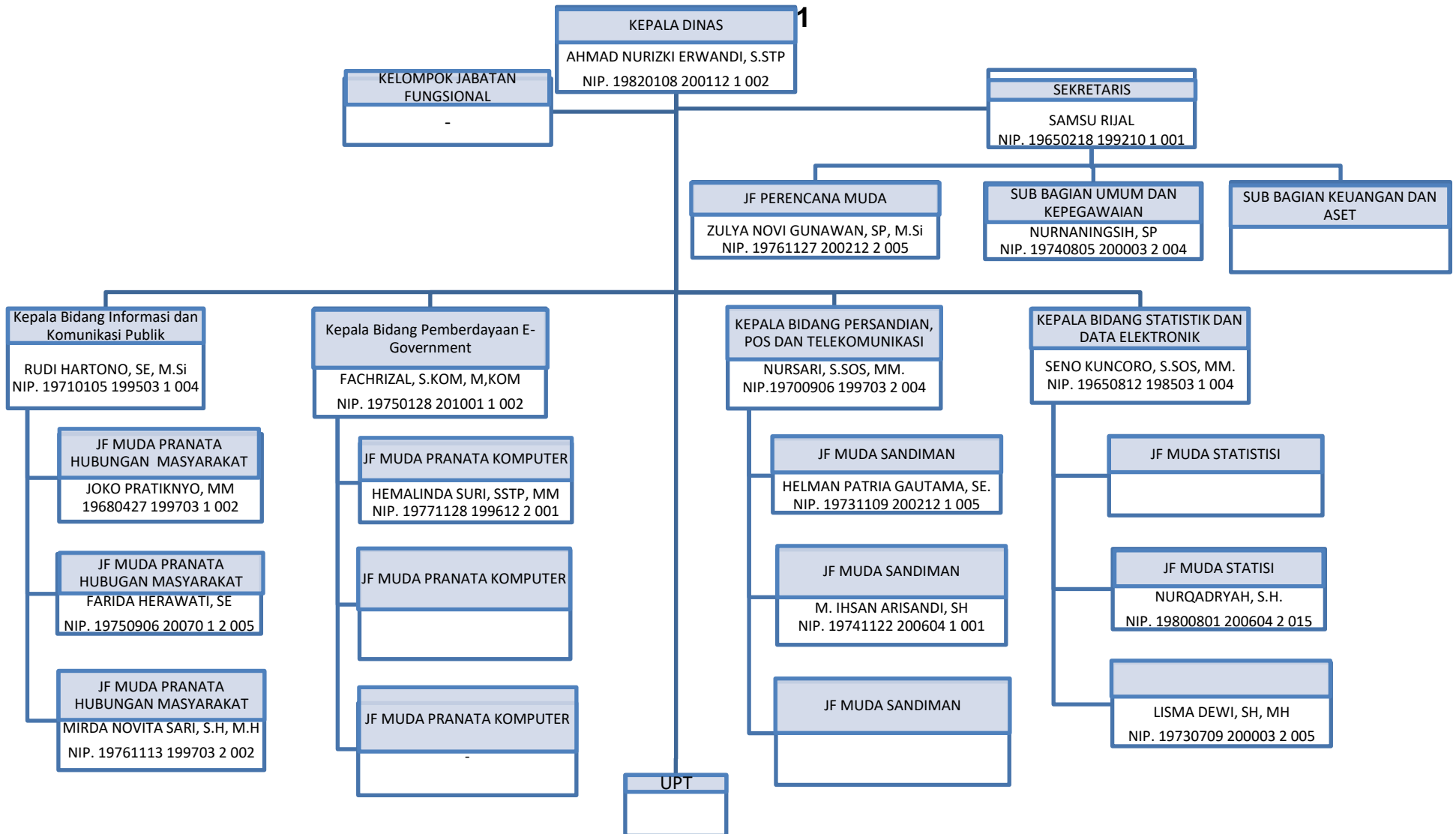
- c) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pengolahan, analisis data serta monitoring terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 2. Memberikan rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan pembiayaan daerah;
 3. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pengolahan dan analisis data terkait Belanja Daerah;
 4. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pengolahan, analisis data serta monitoring terkait laporan keuangan dinas/daerah;
 5. Melakukan identifikasi, inventarisasi pengolahan dan analisis data terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 6. Memberikan rekomendasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 7. melakukan monitoring dan evaluasi terkait rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 8. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait dana dekonsentrasi;
- d) Jabatan Fungsional Arsiparis
Jabatan Fungsional Arsiparis mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun konsep pedoman pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 2. Menilai/menyeleksi arsip elektronik yang akan disusutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 3. Menyiapkan inventaris arsip sesuai dengan prosedur yang

- berlaku untuk kelancaran pelaksanaantugas;
4. Memberikan layanan konsultasi teknis kearsipan dinamis sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Menyusun materi penyuluhan kearsipan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksana antar tugas;
 6. Mengumpulkan bahan publikasi kearsipan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Merancang petunjuk teknis pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. Menganalisa data/menyusun konsep petunjuk teknis pengelolaan arsip sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 9. Mengikuti bimbingan teknis kearsipan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 10. Melakukan pengawasan kearsipan dinamis sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Tahapan

Jenis, Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

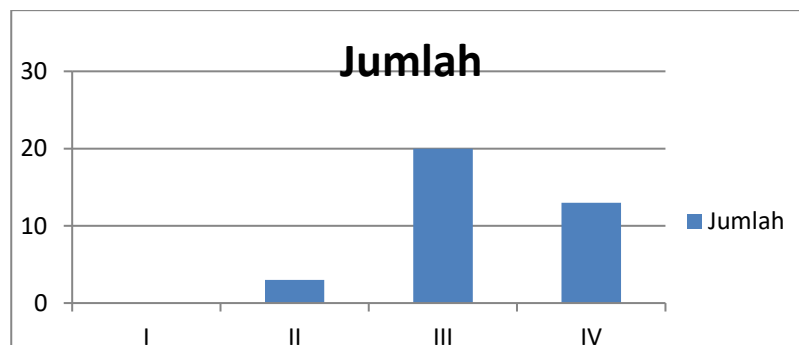


E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2022 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 69 orang, terdiri atas PNS sebanyak 36 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 29 orang dan Pol PP sebanyak 4 orang. Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Golongan I : 0 Orang
2. Golongan II : 3 Orang
3. Golongan III : 20 Orang
4. Golongan IV : 13 Orang

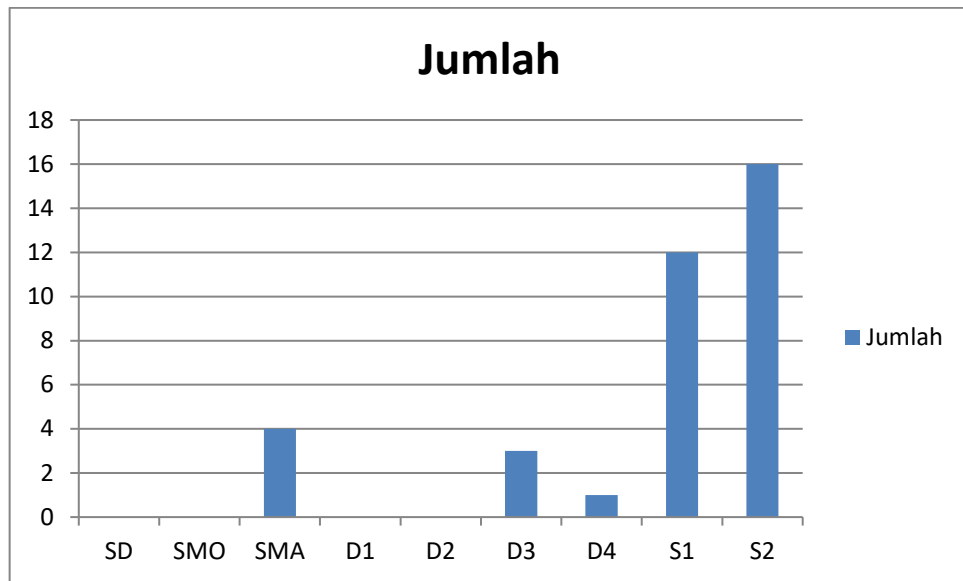
Grafik 1.1.
Komposisi PNS menurut Golongan (orang)



Jumlah komposisi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dilihat dari pendidikan sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. SD : 0 Orang
2. SMP : 0 Orang
3. SMA : 4 Orang
4. D1 : 0 Orang
5. D2 : 0 Orang
6. D3 : 3 Orang
7. D4 : 1 Orang
8. S1 : 12 Orang
9. S2 : 16 Orang

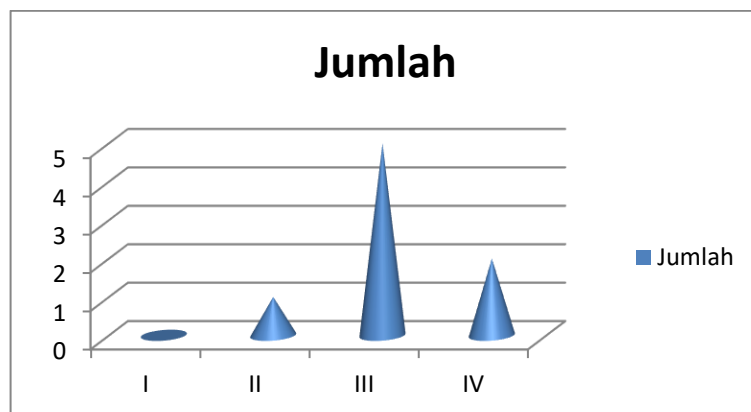
Grafik 1.2.
Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan (orang)



Adapun komposisi PNS dalam jabatan struktural di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Eselon I :0 Orang
2. EselonII :1 Orang
3. EselonIII :5 Orang
4. EselonIV :2 Orang
5. Jabatan Fungsional :9 Orang

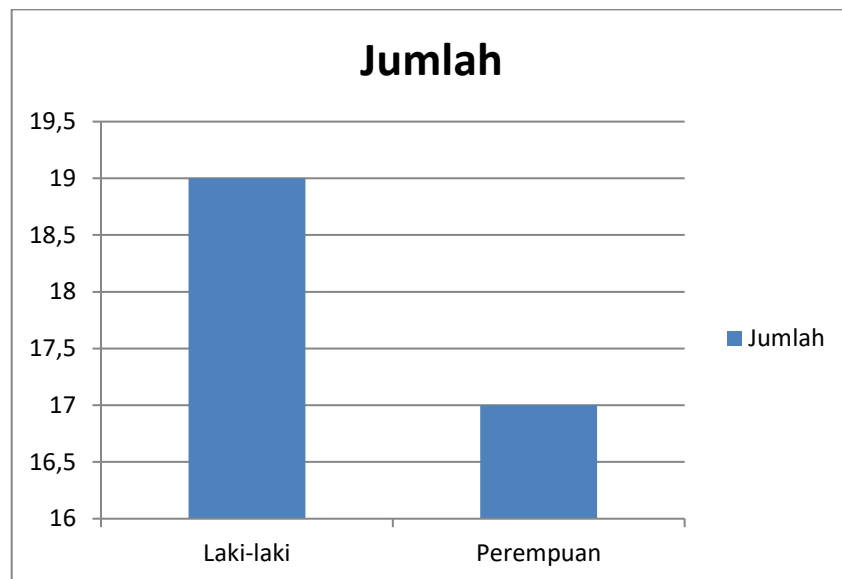
Grafik 1.3.
Komposisi Jabatan Struktural (orang)



Sedangkan komposisi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan jenis kelamin sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Laki-laki : 19 Orang
2. Perempuan : 17 Orang

Grafik 1.4.
Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin (orang)



F. SARANA DAN PRASARANA

Tabel 1.1.
Sarana dan Prasarana (LAMPIRAN)

G. SUMBER DAYA KEUANGAN

Laporan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2022 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
- 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung (urusan dan nonurusan)

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini:

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung mengelola Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar tugas kepala daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Didalam melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar tersebut, pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung melaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung melaksanakan :

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Urusan Komunikasi dan Informatika	3	10	28
Urusan Statistik	1	1	4
Urusan Persandian	1	1	3
Total	5	12	35



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merumuskan 5 (lima) Program dengan 12 (duabelas) kegiatan pendukung dengan total pagu anggaran setelah perubahan (APBDP-TA.2022) sebesar Rp16.266.711.398,00 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Retribusi Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
2.	Belanja Daerah	16.266.711.398,00	13.734.151.264,00	(2.532.560.134,00)	(15,56)
1.1.	Belanja Operasi	14.795.711.398,00	12.593.191.264,00	(2.202.520.134,00)	(14,88)
	Belanja Pegawai	3.647.319.004,00	3.495.714.487,00	(151.604.517,00)	(4,15)
	Belanja Barang dan Jasa	10.501.892.394,00	9.007.476.777,00	(1.494.415.617,00)	(14,23)
	Belanja Hibah	645.500.000,00	90.000.000,00	(556.500.000,00)	(86,07)
1.2.	Belanja Modal	1.472.000.000,00	1.140.960.000,00	(330.040.000,00)	(22,43)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.316.000.000,00	990.960.000,00	(325.040.000,00)	(24,69)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.000.000,00	150.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,22)
	Jumlah Belanja Daerah	16.266.711.398,00	13.734.151.264,00	(2.532.560.134,00)	(15,56)
	Surplus /Defisit	(13.420.408.758,00)	(12.934.468.264,00)	485.940.494,00	(3,62)
3.	Pembiayaan Daerah	0	0	0	0
	Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	0	0	0	0
	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran	(13.420.408.758,00)	(12.934.468.264,00)	485.940.494,00	(3,62)



Tabel 1.4
Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandar Lampung Tahun 2022

Urutan Pemerintahan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kelembagaan (Secara Keseluruhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel, Transparansi dan Inovatif	Ketepatan Akuntabilitas dan Keuangan	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Infrastruktur Telekomunikasi Terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	95%	1. Tidak sesuai rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi Akibat Covid 19)	1. Penetapan cash budget disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi	
				2. Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Serat Optik dalam Gedung, Antar Gedung dan dalam Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Manajemen Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98%	95%	-	-	-
				3. Tersedianya Akses Informasi Melalui Internet di Setiap SKPD di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Manajemen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				4. Tersedianya Akses Internet Gratis Bagi Publik	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Manajemen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				5. Tersedianya Pusat Data dan Informasi (Data Center)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Manajemen Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	98%	95%	-	-	-
				6. Tersedianya Pusat Monitoring dan Kendali (Command Center)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				7. Tersedianya Sistem Administrasi Lesspaper Dalam Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Manajemen Administrasi Keuangan	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				8. Tersedianya Sistem Komunikasi Berbasis TIK Seperti E-Mail, Mobile Instant Messenger dll.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Manajemen Laporan Keuangan Akhir OPD	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				9. Meningkatkan Ketersediaan Website SKPD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Manajemen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98%	95%	-	-	-
				10. Pengaturan Domain dan Subdomain	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Manajemen Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				11. Tersedianya Sistem Informasi Berbasis TIK untuk Pelayanan Publik.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Manajemen Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%	-	-	-
				12. Tersedianya Sistem Monitoring Kota dengan Pemanfaatan TIK	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Manajemen Alat Tulis Kantor	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				13. Tersedianya Sistem Informasi berbasis TIK yang dapat menunjang Pelayanan Publik	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Manajemen Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				14. Tersedianya Sistem Informasi Terpadu Tentang Kota Bandar Lampung	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Manajemen Layanan Makan dan Minum Rapat	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				15. Tersedianya Database yang Lengkap Tentang Potensi Daerah di Berbagai sektor (Pariwisata, Jasa dan Perdagangan)	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Manajemen Barang Cetak dan Penggandaan	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				16. Tumbuhnya Ekonomi Kreatif di Bidang Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Manajemen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				17. Mendorong Pengembangan E-Commerce	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Manajemen Perjalanan Dinas Kantor	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

					anyasistem Informasi yang dapat Mendorong Peningkatan PAD	an Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	uhinya Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%	-	-	-	
					19 Peningkatan Metode/kerja Pengelolaan Informasi di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	giatan Pengadaan Mebel	uhinya Jumlah Mebel	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					20 Tersusunnya Pola Pengelolaan Data dan Informasi yang Aman, Efektif dan Efisien					-	-	-	
					21 Terjalannya Kemitraan Mutualisme dengan Media Massa dalam Diseminasi Informasi	an Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	uhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					22 Tersedianya Konten Informasi Pembangunan Daerah Baik dalam Format Digital Atau Cetak (Teks, Gambar dan Video)	egiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	anyas Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					23 Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Media Informasi Publik (Elektronik, Luar Ruang, Cetak dan Online)	giatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	anyas Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					24 Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)	an Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	haranya Inventaris Kantor	98%	95%	-	-	-	
					25 Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi yang Handal	egiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	aranya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					26 Tersedianya Regulasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi Sesuai Peraturan Perundangan	egiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	aranya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					27 Terjalannya Kemitraan Strategis dengan Para Penyelenggara Layanan Dibidang Pos dan Telekomunikasi	giatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	aranya Jumlah Peralatan Kantor	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
					28 Terlaksananya Edukasi Terkait Penyelenggaraan Layananpos dan Telekomunikasi	giatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	aranya Gedung Kantor	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
						giatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	aranya Jumlah Pendukung Gedung Kantor	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	katnya Akuntabilitas dan Keuangan	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	29 Terbangunnya Pusat Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi	an Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	100%	100%	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi. 2. Tidak terlaksananya kerja sama dengan salah satu media online dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh dinas komunikasi dan informatika	1. Tersediaanya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi 2. Lebih selektif dalam memilih media online untuk melakukan kerjasama di dinas komunikasi dan informatika.	-	-	
					30 Terlaksananya Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Keahlian ASN	an Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	100%	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi. 2. Tidak terlaksananya kerja sama dengan salah satu media online dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh dinas komunikasi dan informatika	1. Tersediaanya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi 2. Lebih selektif dalam memilih media online untuk melakukan kerjasama di dinas komunikasi dan informatika.	-	-
					anyas Sosialisasi Danedukasi Tentang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Teknologi	egiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	anyas Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
						giatan Pelayanan Informasi Publik	anyas Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	2 Bulan	12 Bulan	-	-	-	



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

						giatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	anya Informasi yang Ditempaikan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	8 Bulan	12 Bulan	-	-	-
						Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	annya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	8 Bulan	12 Bulan	-	-	-
						RAM APLIKASI INFORMATIKA	ase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	85%	70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sesuai rencana kegiatan yang diuangkan dalam cash budget 2. Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi 3. Pengurangan Pagu Anggaran (Rasionalisasi) 4. Tidak sesuai rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget yang diusulkan dengan cash budget yang ditetapkan, sehingga banyak kegiatan yang terlambat dilaksanakan atau direalisasikan pendanaannya. 5. Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat perlu ditingkatkan 6. Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien 7. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi) 8. Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan cash budget disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan 2. Terjangkau induk jaringan komunikasi beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung. 3. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi 4. Penetapan cash budget disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam usulan cash budget. 5. Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat 6. Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien 7. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi) 8. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public 	-
						ase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	ase Koneksi Jaringan Internet di Lingkungan Sekretariat Pemkot dan Area Publik	95%	90%	-	-	-
						an Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	nya Koneksi Jaringan Internet di Lingkungan Sekretariat Pemkot dan Area Publik	95%	90%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat perlu ditingkatkan 2. Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien 3. Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public 4. Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi) sehingga ada item yang tidak dilaksanakan pada kegiatan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat 2. Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien 3. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public. 4. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi 	-
						giatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	nya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	8 Bulan	12 Bulan	-	-	-
						an Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	95%	12%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat perlu ditingkatkan 2. Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat 2. Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring 	-



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

						center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien						center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien		
						Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Menara Telekomunikasi	3 Bulan	12 Bulan			Adanya perubahan data pada Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	Pendataan Ulang	-
						Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Grasinya Jumlah Jenis Data Base	3 Bulan	12 Bulan			1. Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan 2. Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien 3. Belum terseleenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public 4. Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi) ada item yang tidak dilaksanakan pada kegiatan tersebut.	1. Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat 2. Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien 3. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public 4. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi	-
IN STATISTIK						RAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Grasinya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada			-	-	-
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada			-	-	-
						Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Grasinya Jenis Data Base	3 Bulan	12 Bulan			-	-	-
						Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Grasinya Operasional Literasi Data dan Informasi	3 Bulan	12 Bulan			-	-	-
						Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Grasinya Data Sektoral	3 Bulan	12 Bulan			-	-	-
						Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Grasinya Jumlah Infrastruktur Data dan Informasi	3 Bulan	12 Bulan			-	-	-
IN PERSANDIAN						RAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Grasinya Penguasaan Informasi Daerah Yang Terselenggara Baik	95%	90%			Adanya perubahan data pada data POSTELBUS dan Penyiaran	Pendataan Ulang	-
						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Grasinya Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	95%	90%			Adanya perubahan data pada data POSTELBUS dan Penyiaran	Pendataan Ulang	-
						Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Grasinya Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota yang Terkelola dengan Baik	95%	90%			Adanya perubahan data pada data POSTELBUS dan Penyiaran	Pendataan Ulang	-
						Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Grasinya Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	3 Bulan	12 Bulan			-	-	-
						Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Grasinya Call Center dan Persandian untuk Keamanan Informasi	3 Bulan	12 Bulan			-	-	-



Tabel I.5
Perubahan Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Lampung Tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Murni	Perubahan	Realisasi Perubahan	% Realisasi	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8			9=8-7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-	10.459.466.978,55	16.266.711.398,00	13.735.505.134,00	84,44	5.807.244.419,45
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	9.744.388.978,55	15.512.133.398,00	13.415.188.797,00	86,48	5.767.744.419,55
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	95%	4.310.072.078,55	5.178.180.428,00	4.551.807.217,00	87,90	868.108.349,45
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98%	95%	60.000.000,00	60.000.000,00	7.125.000,00	11,88	0
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	3.575.000,00	11,92	0
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	3.550.000,00	11,83	0
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Pelaporan	98%	95%	3.391.653.566,55	3.677.869.004,00	3.526.940.857,00	95,90	286.215.437,45



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

			Keuangan OPD yang Akuntabel							
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	3.155.303.566,55	3.441.519.004,00	3.298.168.357,00	95,83	286.215.437,45
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	206.350.000,00	206.350.000,00	198.900.000,00	96,39	0
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir OPD	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	29.872.500,00	99,56	0
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98%	95%	15.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	33,33	30.000.000,00
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	33,33	30.000.000,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%	165.942.500,00	245.817.500,00	191.734.861,00	78,00	(79.875.000,00)
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.777.000,00	24.777.000,00	24.193.788,00	97,65	0
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	9.339.500,00	9.339.500,00	9.323.670,00	99,83	0
		Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat	12 Bulan	12 Bulan	29.206.000,00	96.206.000,00	44.712.500,00	46,48	67.000.000,00
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	22.720.000,00	22.720.000,00	22.382.400,00	98,51	0
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100	0
		Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	67.900.000,00	80.775.000,00	79.122.503,00	97,95	12.875.000,00
		iatan Pengadaan	Terpenuhinya	98%	95%	50.000.000,00	125.000.000,00	0	0	75.000.000,00



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Inventaris Kantor								
Kegiatan Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Jumlah Mebel	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	125.000.000,00	0	0	75.000.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	12 Bulan	12 Bulan	489.000.000,00	879.000.000,00	730.000.000,00	83,05	(390.000.000,00)	
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	
Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	487.000.000,00	877.000.000,00	730.000.000,00	83,24	390.000.000,00	
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor	98%	95%	138.476.012,00	145.493.924,00	81.006.499,00	55,68	7.017.912,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	33.532.088,00	40.550.000,00	37.453.000,00	92,36	7.017.912,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	23.000.000,00	23.000.000,00	21.553.499,00	93,71	0	
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	0	
Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	59.443.924,00	59.443.924,00	0	0	0	
Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Pendukung Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	93,33	0	
PROGRAM	Persentase	100%	100%	3.701.894.900,00	5.630.975.100,00	4.210.669.156,00	74,78	1.929.080.200,00	



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

		PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi							
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	100%	3.701.894.900,00	5.630.975.100,00	4.210.669.156,00	74,78	1.929.080.200,00
		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	3.600.000,00	10,00	0
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	12 Bulan	12 Bulan	1.786.712.000,00	2.273.712.000,00	2.105.607.456,00	92,61	487.000.000,00
		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	20.900.000,00	20,90	0
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.779.182.900,00	3.221.263.100,00	2.080.561.700,00	64,59	1.442.080.200,00
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	85%	70%	1.732.422.000,00	4.702.977.870,00	4.652.712.424,00	98,93	2.970.555.870,00
			Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	95%	90%					
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	95%	90%	1.145.000.000,00	3.338.455.870,00	3.327.641.722,00	99,68	2.193.455.870,00
		Sub Kegiatan	Tersedianya Koneksi	12 Bulan	12 Bulan	1.145.000.000,00	3.338.455.870,00	3.327.641.722,00	99,68	2.193.455.870,00



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik							
		Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Penedalihan Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	95%	12%	587.422.000,00	1.364.522.000,00	1.325.070.702,00	97,11	777.100.000,00
		Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	156.422.000,00	156.422.000,00	133.770.702,00	85,52	0
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Jumlah Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	431.000.000,00	1.208.100.000,00	1.191.300.000,00	98,61	777.100.000,00
	JSAN STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada	277.500.000,00	277.500.000,00	66.625.000,00	24,00	0
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada	277.500.000,00	277.500.000,00	66.625.000,00	24,00	0
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terintegrasinya Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	66.600.000,00	66.600.000,00	8.400.000,00	12,61	0
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegraasi	Terlaksananya Operasional Literasi Data dan Informas	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0
		Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	7.500.000,00	5,00	0
		Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Terpeliharanya Jumlah Infrastruktur Data dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	22.500.000,00	22.500.000,00	20.725.000,00	92,11	0
	JSAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentasae Pngamanan Informasi Daerah	95%	90%	437.578.000,00	477.078.000,00	253.691.337,00	53,18	39.500.000,00



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

	PENGAMANAN INFORMASI	yang Terselenggara Baik							
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	95%	90%	437.578.000,00	477.078.000,00	253.691.337,00	53,18	39.500.000,00
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemaanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota yang Terkelola dengan Baik	95%	90%	40.000.000,00	40.000.000,00	31.763.337,00	79,41	0
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengebangan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	12 Bulan	12 Bulan	295.000.000,00	334.500.000,00	120.150.000,00	35,92	39.500.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Call Center dan Persandian untuk Keamanan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	102.578.000,00	102.578.000,00	101.778.000,00	99,22	0
JUMLAH					10.459.466.978,55	16.266.711.398,00	13.735.505.134,00	84,44	5.807.244.419,45

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Tidak sesuainya rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget yang diusulkan dengan cash budget yang ditetapkan, sehingga banyak kegiatan yang terlambat dilaksanakan atau direalisasikan pendanaannya.
- 2) Kurangnya peningkatan wawasan pegawai dengan pendidikan dan pelatihan pada masing-masing unit bidang agar tersedia SDM yang handal dalam bidang Telekomunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- 3) Kurang maksimalnya koordinasi antara instansi dan *Stakeholder* terkait dalam pelaksanaan bidang Telekomunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam mewujudkan *good governance*;

Solusi

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

- 1) Penetapan cash budget disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam usulan cash budget.
- 2) Perlunya peningkatan wawasan pegawai dengan pendidikan dan pelatihan pada masing-masing unit bidang agar tersedia SDM yang handal dalam bidang Telekomunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- 3) Memaksimalkan koordinasi antara instansi dan *Stakeholder* terkait dalam pelaksanaan bidang Telekomunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam mewujudkan *good governance*;
- 4) Adanya dukungan finansial yang cukup untuk melakukan pembangunan di bidang Telekomunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian guna mencapai tujuan pembangunan di Kota Bandar Lampung;

I. RUANG LINGKUP

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2022, berdasarkan penilaian pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

J. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahunmendatang.

BABI PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan LAKIP, penjelasan umum organisasi (Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya), permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi, Ruang Lingkup Pelaporan dan Sistimatika.

BABII PERENCANAANKINERJA

Menjelaskan tentang Rencana Strategis dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian organisasi serta saran/langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 berdasarkan pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01) dan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58) yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), Juga memuat berbagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan menetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan yang disertai indikator target dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1. VISI DAN MISI

1) Visi dan Misi Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik terutama menyangkut pada keterbukaan informasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam perspektif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung, perwujudan masyarakat kota seperti yang disebutkan akan selalu berkaitan dengan bagaimana semua elemen pemangku kepentingan di Kota Bandar Lampung berperan sesuai dengan porsinya masing-masing didalam hal

mengkomunikasikan semua informasi yang diperlukan secara tepat, tepat cara dan tepat sasaran. Dalam hal ini komunikasi memegang peran yang amat vital terhadap capaian target pembangunan, karena hakikat pembangunan yang menyeluruh membutuhkan peran serta seluruh elemen didalamnya khususnya bagaimana cara Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan strategi, tujuan dan rencana pembangunan serta menyerap segala aspirasi masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan itu sendiri.

Dalam perspektif Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung, perwujudan Masyarakat Kota seperti yang disebutkan akan selalu berkaitan dengan bagaimana semua elemen pemangku kepentingan di Kota Bandar Lampung berperan sesuai dengan porsinya masing-masing didalam hal mengkomunikasikan semua informasi yang diperlukan secara tepat, tepat cara dan tepat sasaran. Dalam hal ini komunikasi memegang peran yang amat vital terhadap capaian target pembangunan, karena hakikat pembangunan yang menyeluruh membutuhkan peran serta seluruh elemen didalamnya khususnya bagaimana cara Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan strategi, tujuan dan rencana pembangunan serta menyerap segala aspirasi masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan itu sendiri. Visi Kota Bandar Lampung merupakan cerminan upaya pencapaian misipemerintah Kota Bandar Lampung. Untuk menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang memiliki peran yang kuat, banyak aspek yang menjadi perhatian sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika sehingga menjadi lokomotif pembangunan di kota Bandar Lampung.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, memiliki peran dan fungsi dalam urusan Komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian sangat strategis keberadaannya dalam kerangka pencapaian Visi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih adalah sebagai berikut:

**“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA,
NYAMAN, UNGGUL BERDAYASAING BERBASIS EKONOMI UNTUK
KEMAKMURAN RAKYAT”**

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

BANDARLAMPUNG :

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

SEHAT :

Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih,nyaman,aman dan sehat untuk beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

CERDAS :

Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BERIMAN :

Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum,bermoral,dan berakhlak mulia.

BERBUDAYA :

Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

NYAMAN :

Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI,Polri,Linmas dan Partisipasi Masyarakat.

UNGGUL :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung

BERDAYASAING :

Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN :

Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan Yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah ditetapkan tersebut, makam isi pembangunan Kota Bandar Lampung dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang

religius.

6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA:

Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat . Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA :

Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISIKETIGA :

Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomidan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain,serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KEEMPAT:

Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang

berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

MISI KELIMA:

Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KEENAM:

Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH:

Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Ditinjau dari sisi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang menangani urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian daerah, maka secara umum tugas dan

fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian **Misi ke-6** yaitu “**Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi**”.

Berdasarkan penjabaran misi 6 tersebut, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung adalah dalam rangka mendukung pencapaian **Tujuan** yaitu “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif**”, dengan **Sasaran** yaitu **Terciptanya Inovasi Layanan Publik**, dan **Strategi** yaitu **Meningkatkan Akses Masyarakat dalam Informasi dan Layanan**.

Beberapa Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung

PENGHAMBAT	PENDORONG
MISI6: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.	
PENGHAMBAT	PENDORONG
Belum optimalnya kebijakan, Sinkronisasi Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah	TuntutankonsistensiantaraPeraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah
Belum optimalnya koordinasi kelembagaan	Mengoptimalkan koordinasi kelembagaan
Belum optimalnya terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik	Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik dan saling terintegrasi satu sama lainnya

Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan	Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat
Reformasi struktural menjadi fungsional menuntut kompetensi Sumber Daya Manusia untuk lebih ditingkatkan lagi	Kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kementerian lainnya guna mendukung peningkatan kompetensi sumberdaya manusia bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi	Terjangkau induk jaringan komunikasi beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau
Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi Akibat Covid 19)	Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi
Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien	Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi)	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi)
Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah	Sinkronisasi Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah sehingga perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah dapat dihilangkan
Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan Satu Data	Sudah dilakukan koordinasi Kelembagaan antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan BPS
Adanya perubahan data pada data POSTELSUS dan Penyiaran	Melakukan Pendataan Ulang pada Penyelenggaraan POSTELSUS dan Penyiaran
Belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah	Mengoptimalkan pengamanan terhadap sistem sandi daerah

1. Strategi Arah Kebijakan, dan program RPJMD Sesuai Dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung

Pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo Kota Bandar Lampung masuk kedalam Misi 6 dengan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan pembangunan, serta program yang termuat

dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

VISI

Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman,Berbudaya,Nyaman,Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat

MISI 6

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,berwibawa,dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi

NO.		TUJUAN		SASARAN		STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN
1	6.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien,, Akuntabel Transparan dan Inovatif	6.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1	Meningkatkan kualitas Perencanaan, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1	Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
							2	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
							3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
							4	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah serta Kepatuhan terhadap Laporan Keuangan
			6.1.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1	Meningkatnya Akses Masyarakat dalam Informasi dan Layanan	1	Mengembangkan E-Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

							2	Memperkuat dan Memperluas Jangkauan Teknologi Komunikasi dan Informatika
							3	Menciptakan Inovasi Layanan di Segala Bidang
							4	Mengembangkan Penelitian untuk Inovasi Daerah
							5	Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Memberikan Informasi dan Pelayanan Publik



Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Bandar Lampung serta RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kantor menyatu dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal manayang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien.
2. Memiliki infrastruktur TIK yang handal, memiliki data center dan command center;
3. Sumberdaya aparatur memiliki kompetensi yang memadai;
4. Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan kewenangan bidangurusan komunikasi dan informatika di daerah;
5. Ketersediaan anggaran yang proporsional dan memadai;
6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan,
7. Kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi);

Menilik dari tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, diproyeksikan ke depan bahwa Diskominfo Kota Bandar Lampung menjadi pusat unggulan dan memiliki posisi serta peran penting bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal menjalankan:

1. Fungsi Diseminasi Informasi, sebagai pusat penyebaran informasi dari Pemerintah Kota berkaitan dengan kebijakan, peraturan perundang-undangan, program kerja, target dan pencapaian hasil pembangunan dan lain sebagainya.
2. Fungsi Penyerapan Aspirasi Publik, sebagai salah satu Satuan Kerja yang dapat secara optimal menyerap segala hal berkaitan dengan aspirasi publik lewat program dan kegiatan serta pemanfaatan TIK.



3. Fungsi pelayanan berbasis TIK dengan implementasi pelaksanaan E-Government untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Fungsi pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah di bidang pemanfaatan TIK.
5. Fungsi kemitraan dengan badan usaha, komunitas profesi dan praktisi di bidang pos, telekomunikasi dan informatika agar terjadi sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
6. Fungsi katalis dan penunjang pemberdayaan ekonomi rakyat dengan pemanfaatan TIK.
7. Fungsi penggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melaksanakan kewenangan dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan aturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Demi mewujudkan Kota Banda Lampung menjadi Kota ***Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat*** sebagaimana tertera pada Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 di atas, Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bandar Lampung mengangkat beberapa isu strategis bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang dirumuskan melalui kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (*Strenght-Weakness Oportunity-Threat / SWOT*).

Tabel 2.3.
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
(*Strenght-Weakness Oportunity-Threat / SWOT*)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung

<p>Analisis Lingkungan Internal (ALI)</p> <p>Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)</p>	<p>Kekuatan (<i>Strenght</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecenderungan pendapatan daerah yang terus meningkat. • Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif • Adanya SOP yang merupakan mekanisme standar pelaksanaan tugas. 	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompeten aparatur di bidang IT masih belum memadainya • Kinerja pelayanan publik belum memuaskan pengguna jasa pelayanan publik. • Sarana dan prasarana Sarana Komunikasi dan Informatika belum memadai. • Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi.
<p>Peluang (<i>Oportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laju pertumbuhan perekonomian di daerah. • Pusat pendidikan, perekonomian dan perdagangan yang semakin luas dan kota jasa. • Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. 	<p>Strategi (S – O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspirati mendorong pengembangan kota jasa yang profesional. • Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian. • Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik. 	<p>Strategi (W – O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. • Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsive dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas. • Optimalisasi penggunaan teknologi system informasi dalam mendukung pengembangan kota jasa yang kompetitif.
<p>Ancaman (<i>Threat</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat yang cenderung mengarah pada kepentingan kelompok • Krisis keuangan global. • Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. 	<p>Strategi (S – T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang 	<p>Strategi (W – T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki manajemen layanan publik berbasis reinventing government. • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



<ul style="list-style-type: none">• Perbankan belum menjamin alokasi dana pada sektor riil dan sektor UKM.• Penurunan luas lahan terbuka hijau.	<p>investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan	
--	--	--

2. Telaahan Renstra K/L Komunikasi dan Informatik

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan. Fokus Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran



strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemenkominfo selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Kemenkominfo melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), farming dan refarming frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional. Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan startup digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem



Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan Presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks. Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi

serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan 6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020 – 2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk: 1) Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; 2) Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; 3) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); dan 4) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/e-commerce). Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendesak Kemenkominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 diarahkan untuk mendukung 7 percepatan transformasi digital nasional, dimana pada 5 (lima) tahun ke depan fokus Kemenkominfo adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri,

pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

3. **Telaahan Renstra Telaahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Visi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah: **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang tertuang dalam misi ke 2 yaitu *“Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”*, yang secara khusus mendukung agenda kerja *“Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation*. Dan juga mendukung agenda kerja *“smart school:*



pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan” sebagai perwujudan misi ke-3 yaitu: “meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Diskominfo juga turut mendukung misi ke-4 yaitu: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, dengan agenda kerja Infrastruktur Lampung Berjaya: konektivitas antar Kabupaten/ Kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi, dan agenda kerja Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan infrastruktur: berbasis peran warga dan pemanfaatan IT.

Untuk mewujudkan misi diatas maka Dinas Kominfo merumuskan 4 Program Prioritas yaitu: Program Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Tabel 2.4.
Komparasi Sasaran Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung dan Renstra K/L

Indikator Kinerja	Sasaran Pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L		
		KOMINFO	BSSN	BPS
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya kualitas implementasi egovernment	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien diseluruh wilayah Indonesia	Terwujudnya tatakelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif	
		Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas	Meningkatnya kompetensi dan kinerja SDM dibidang keamanan informasi yang	



		pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	berorientasi pada kesiapan pelaksanaan layanan keamanan informasi secara mandiri	
Persentase OPD Provinsi Lampung yang memenuhi standar layanan informasi	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif	Terwujudnya layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna	
Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang update	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral			Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem

Tabel 2.5.
Tantangan dan Peluang Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

TANTANGAN	PELUANG
Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi	Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo dan statistik
Kesenjangan informasi di masyarakat	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
Pesatnya perkembangan TIK	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata	Kebutuhan pengembangan muatan eGovernment
Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
Penyajian data statistik sektoral yang akurat dan akuntabel	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang kominfo dan statistik
	Tersedianya layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektora

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, serta pemanfaatan informasi dan teknologi, klasifikasi informasi melalui persandian,



dan pengolahan data statistik sektoral. Permasalahan secara umum yang terjadi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Masih rendahnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan.
2. Belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi eGovernment meskipun kelembagaan sudah terbentuk, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala.
3. Kurangnya pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi yang menjunjung nilai-nilai budaya.
4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahan .
5. Belum optimalnya data sektoral yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, dan masih kurangnya database sektoral serta pengamanan data dengan usaha klasifikasi informasi.

Demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera) sebagaimana tertera pada Visi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mengangkat beberapa isu strategis bidang komunikasi, informatika dan statistik adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Provinsi Lampung dengan peran seluruh Perangkat Daerah dengan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai koordinator;
2. Perlunya penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Lampung pada semua Perangkat Daerah;
3. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Percepatan pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Lampung melalui penerapan seluruh



aplikasi yang telah disiapkan

5. Peningkatan penyediaan layanan informasi website online yang up to date secara terkoordinasi sehingga domain masing-masing Perangkat Daerah akan berada di bawah domain www.lampungprov.go.id;
6. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal;
7. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat secara mudah;
8. Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
9. Menjamin ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat;
10. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan

Dengan mendasarkan kepada : modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005- 2025; maka Visi Provinsi Lampung 2005-2025 adalah : **“LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025”** Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum). Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005- 2025, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut

1. Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.



Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan seperti yang diinginkan, maka arah pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Tahapan Perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025 adalah: 1. RPJM Kesatu (2005 – 2009) 2. RPJM Kedua (2010 – 2014) 3. RPJM Ketiga (2015 – 2019) 4. RPJM Keempat (2020 – 2024)

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : "Rakyat Lampung Berjaya". Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai. Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut: 1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi



dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

4.1 Analisis Lingkungan Internal (ALI)

4.1.1 Kekuatan (*Strenght / S*)

1) Kecenderungan pendapatan daerah yang terus meningkat.

Peningkatan kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif

Adanya Kepemimpinan Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas dan akseptabilitas serta mobilitas yang tinggi, memungkinkan aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomodasi, juga memiliki kemampuan membangun *Partner Aliansi Strategic* dengan berbagai lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga Non Pemerintah (NGO) atau LSM.

4.1.2 Kelemahan (*Weakness/W*)

1) Kompeten aparatur di bidang IT masih belum memadainya

Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung cukup memadai hal ini dapat dilihat dari komposisi golongan, pangkat dan eselonisasi jabatan serta latar belakang pendidikan, sehingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat akan bisa dicapai. Dan banyaknya jumlah pegawai yang mengisi jabatan fungsional mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangun birokrasinya lebih berorientasi kepada kekuatan keahlian (*Expert Power*).

2) Kinerja pelayanan publik belum memuaskan pengguna jasa pelayanan publik.

Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna jasa publik, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis dan para investor. Hal ini terkait dengan prosedur dan tata cara pelayanan yang belum mengarah kepada penerapan konsep “*One-Stop Service*” karena memang dalam pelaksanaannya masih terkesan birokratis, persyaratan yang berbelit-belit dan lamanya waktu yang diperlukan tidak tetap serta biaya pelayanan yang tidak pasti.

3) Sarana dan prasarana Sarana Komunikasi dan Informatika belum memadai

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di negara kita kian merambah ke berbagai sektor, termasuk diantaranya pada sistem manajemen Pemerintahan Daerah. Begitu pula di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang secara bertahap mulai diterapkan teknologi

informasi di berbagai bidang pemerintahan terutama pada bidang pengelolaan keuangan serta beberapa pelayanan publik lainnya. Kondisi tersebut sangat memudahkan pengembangan aplikasi *electronic government (e-gov)* pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Salah satu sarana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dibangunnya akses internet area publik di beberapa titik yang tersebar di seluruh Kota Bandar Lampung sebagai upaya penyediaan layanan internet gratis masyarakat serta sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat

4) Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. Proses globalisasi yang membawa dampak positif maupun negatif terhadap aspek kehidupan, yang juga dirasakan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Di era globalisasi ini, tidak menguasai teknologi informasi identik dengan buta huruf. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi harus diperkenalkan secara luas agar masyarakat mempunyai bekal pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk bisa menerapkan dan menggunakannya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan juga bersaing dalam lingkup global.

4.2 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

6.2.1 Peluang (*Opportunities* / O)

1) Pusat pendidikan, perekonomian dan perdagangan yang semakin luas dan kota jasa.

Bandar Lampung sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena Kota Bandarlampung terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional seperti UNILA, ITERA, IAIN Radin Inten, Univeditas Bandar Lampung, Universitas Dahmajaya. Universitas Tulang Bawang, Universitas Saburai, Universitas Muhammadiyah, Universitas Teknokrat serta perguruan tinggi swasta lainnya, sehingga Kota Bandarlampung berpotensi untuk dikembangkan sebagai *center of exelence* atau pusat keunggulan di bidang SDM, selain itu pula, Kota Bandarlampung memiliki tempat pendidikan dan latihan di berbagai bidang, pusat pemasaran home industry, pelabuhan ekspor impor serta kegiatan perekonomian strategis lainnya telah mendorong Kota Bandarlampung posisinya sebagai kota jasa (*service city*).Banyaknya pusat perdagangan dan wisata kuliner yang merupakan unggulan karena mengundang minat pendatang baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Lampung untuk menghabiskan khususnya waktu akhir pekan yang memberikan omset cukup besar khususnya bagi masyarakat Kota Bandarlampung.

2) Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang kepada Pemerintah Daerah.

Adanya pelimpahan urusan/kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa disimpangi/dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya.

6.2.2 Ancaman

1) Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat yang cenderung mengarah pada kepentingan kelompok.

Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung

nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.

2) Krisis keuangan global.

Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kota Bandarlampung sebagai kota jasa.

3) Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial.

Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial, diantaranya meningkatnya jumlah pencari kerja yang semakin meningkat.

4) Perbankan belum menjamin alokasi dana pada sektor riil dan sektor UKM.

Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian prosentase

penyaluran dana pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan prosentase penyaluran dana pada industri besar.

5) Penurunan luas lahan terbuka hijau.

Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Bandar Lampung, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (*global warming*).

6.2.3 Faktor Pendorong Keberhasilan

Atas dasar tersebut maka faktor kunci keberhasilan adalah untuk mewujudkan pusat pelayanan Informasi menuju Kota Bandar Lampung sebagai kota jasa yang bermartabat diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Diskominfo dan seluruh untuk merealisasi komitmen tersebut maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah :

1. Kemitraan yang kuat dari seluruh aparatur Diskominfo untuk membangun kualitas pusat pelayanan Informasi.
2. Kerjasama yang harmonis dengan berbagai media massa dan lembaga lembaga koalisi masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung dalam rangka mempercepat penyampaian Informasi kepada masyarakat. Adanya penyebaran Informasi guna mempertebal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Adanya dukungan sarana Informasi (surat kabar, radio dan TV) sebagai media Komunikasi dan publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program/kebijakan Pemerintah Kota.
4. Tersedianya kualitas SDM di bidang Informasi dan Komunikasi dengan mengikut sertakan pegawai dalam diklat
5. Tersedianya berbagai Informasi dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang dibutuhkan masyarakat.

6.2.4 Penentuan Isu

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perludikembangkan strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- 1) Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspirati mendorong pengembangan kota jasa yang profesional.
- 2) Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian.
- 3) Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- 1) Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
- 2) Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan

3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)

- 1) Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- 2) Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsive dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas.
- 3) Optimalisasi penggunaan teknologi system informasi dalam mendukung pengembangan kota jasa yang kompetitif.

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)

- 1) Perbaikan manajemen layanan publik berbasis reinventing government.
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD yang akan ditangani pada Renstra OPD kabupaten/kota periode berikutnya. Jika Renstra

K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada:

1. Isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra OPD provinsi;

Kondisi saat ini yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang Komunikasi dan Informatika dapat diidentifikasi ke dalam beberapa hal berikut:

- 1) Kebijakan tentang rencana induk pembangunan dan pengembangan e-government.
- 2) Kebijakan tentang pengelolaan data dan informasi elektronik.
- 3) Kebijakan tentang diseminasi informasi.
- 4) Kebijakan tentang pengelolaan informasi publik.
- 5) Kebijakan yang berkaitan tentang penyelenggaraan pos.
- 6) Kebijakan yang berkaitan tentang penyelenggaraan telekomunikasi.

2. Tujuan dan sasaran;

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur program kerja dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3. Strategi dan kebijakan;

Kota Bandar Lampung hingga saat ini belum memiliki instrumen kebijakan yang cukup untuk melaksanakan

urusan-urusan pemerintahan yang berkenaan dengan kewenangannya di bidang Komunikasi dan Informatika. Instrumen kebijakan yang diperlukan adalah :

- 1) Kebijakan tentang rencana induk pembangunan dan pengembangan e-government.
- 2) Kebijakan tentang pengelolaan data dan informasi elektronik.
- 3) Kebijakan tentang diseminasi informasi.
- 4) Kebijakan tentang pengelolaan informasi publik.
- 5) Kebijakan yang berkaitan tentang penyelenggaraan pos.
- 6) Kebijakan yang berkaitan tentang penyelenggaraan telekomunikasi.

4. Urusan prioritas beserta target kinerjanya;

Secara garis besar urusan prioritas beserta target kinerja yang dapat dijadikan review terangkum ke dalam 3 (tiga) bidang urusan sebagai berikut :

- 1) Komunikasi dan Informatika;
- 2) Statistik;
- 3) Persandian.

5. Indikasi Lokasi Program Prioritas;

6. Indikasi Besaran Pendanaan Program Strategis;

7. Tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. *Review* ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.



B. GAMBARAN TAPKIN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

**TABEL 2.4
GAMBARAN TAPKIN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2022**

No.	Urusan Pemerintahan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kebijakan (Secara Keseluruhan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Pagu Anggaran	
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Terbangunnya Infrastruktur Telekomunikasi Terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		98%	95%	5.178.180.428,00
					2	Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Serat Optikd dalam Gedung, Antar Gedung dan dalam Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98%	95%	60.000.000,00
						Tersedianya Akses Informasi Melalui Internet di Setiap SKPD di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00
					4	Tersedianya Akses Internet Gratis Bagi Publik	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00
					5	Tersedianya Pusat Data dan Informasi (Data Center)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	98%	95%	3.677.869.004,00
					6	Tersedianya Pusat Monitoring dan Kendali (Command Center)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	2 Bulan	12 Bulan	3.441.519.004,00
						Tersedianya Sistem Administrasi Lesspaper Dalam Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan	2 Bulan	12 Bulan	206.350.000,00
					8	Tersedianya Sistem Komunikasi Berbasis TIK Seperti E-Mail, Mobile Instant	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir OPD	2 Bulan	12 Bulan	30.000.000



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

					Messenger dll.						
				9	Meningkatkan Ketersediaan Website SKPD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98%	95%		45.000.000,00
				10	Pengaturan Domain dan Subdomain	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	2 Bulan	12 Bulan		45.000.000,00
				11	Tersedianya Sistem Informasi Berbasis TIK untuk Pelayanan Publik.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%		245.817.500,00
				12	Tersedianya Sistem Monitoring Kota dengan Pemanfaatan TIK	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	2 Bulan	12 Bulan		24.777.000,00
				13	Tersedianya Sistem Informasiberbasis TIK yangdapat MenunjangPelayanan Publik	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	2 Bulan	12 Bulan		9.339.500,00
				14	Tersedianya Sistem Informasi Terpadu Tentang Kota Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat	2 Bulan	12 Bulan		96.206.000,00
				15	Tersedianya Database yang Lengkap Tentang Potensi Daerah di Berbagaisektor (Pariwisata, Jasa dan Perdagangan)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Bulan	12 Bulan		22.720.000,00
				16	Tumbuhnya Ekonomi Kreatif di Bidang Komunikasi dan Informatika	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Bulan	12 Bulan		12.000.000,00
				17	Mendorong PengembanganE-Commerce	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	2 Bulan	12 Bulan		80.775.000,00
					TersedianyaSistem Informasi yang dapat Mendorong Peningkatan PAD	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%		125.000.000,00
					Peningkatan Metodekerja Pengelolaan Informasi di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Jumlah Mebel	2 Bulan	12 Bulan		125.000.000,00
				20	Tersusunnya Pola Pengelolaan Data dan Informasi yang Aman, Efektif dan Efisien	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	2 Bulan	12 Bulan		879.000.000,00
				21	Terjalinnnya Kemitraan Mutualisme dengan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Bulan	12 Bulan		2.000.000,00



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

						Media Massa dalam Diseminasi Informasi	Daya Air dan Listrik				
					22	Tersedianya Konten Informasi Pembangunan Daerah Baik dalam Format Digital Atau Cetak (Teks, Gambar dan Video)	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Bulan	12 Bulan	877.000.000,00
					23	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Media Informasi Publik (Elektronik, Luar Ruang, Cetak dan Online)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor	98%	95%	145.493.924,00
					24	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Bulan	12 Bulan	40.550.000,00
					25	Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi yang Handal	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	2 Bulan	12 Bulan	23.000.000,00
					26	Tersedianya Regulasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi Sesuai Peraturan Perundangan	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Peralatan Kantor	2 Bulan	12 Bulan	15.000.000
					27	Terjalinnnya Kemitraan Strategis dengan Para Penyelenggara Layanan Dibidang Pos dan Telekomunikasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 Bulan	12 Bulan	59.443.924,00
					28	Terlaksananya Edukasi Terkait Penyelenggaraan Layananpos dan Telekomunikasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Pendukung Gedung Kantor	2 Bulan	12 Bulan	7.500.000,00
		Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	29	Terbangunnya Pusat Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	100%	100%	5.630.975.100,00
					30	Terlaksananya Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Keahlian ASN	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	100%	5.630.975.100,00
						Terlaksananya	Sub Kegiatan Pengelolaan	Terlaksananya Pengelolaan	2 Bulan	12 Bulan	36.000.000,00



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

						Sosialisasi Danedukasi Tentang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Teknologi	Media Komunikasi Publik	Media Komunikasi Publik			
							Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	2 Bulan	12 Bulan	2.273.712.000,00
							Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	2 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	2 Bulan	12 Bulan	3.221.263.100,00
							PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	85%	70%	4.702.977.870,00
								Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	95%	90%	
							Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	95%	90%	3.338.455.870,00
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	2 Bulan	12 Bulan	3.338.455.870,00
							Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	95%	12%	1.364.522.000,00
							Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi	2 Bulan	12 Bulan	156.422.000,00
							Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Jumlah Jenis Data Base	2 Bulan	12 Bulan	1.208.100.000,00
	URUSAN STATISTIK						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada	277.500.000,00
							Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada	277.500.000,00
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Terintegrasinya Jenis Data Base	2 Bulan	12 Bulan	66.600.000,00



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

							Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				
							Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Operasional Literasi Data dan Informatika	2 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00
							Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral	2 Bulan	12 Bulan	150.000.000,00
							Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Terpeliharanya Jumlah Infrastruktur Data dan Informasi	2 Bulan	12 Bulan	22.500.000,00
	URUSAN PERSANDIAN						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	95%	90%	477.078.000,00
							Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	95%	90%	477.078.000,00
							Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota yang Terkelola dengan Baik	95%	90%	40.000.000,00
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengebangan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	2 Bulan	12 Bulan	334.500.000,00
							Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Call Center dan Persandian untuk Keamanan Informasi	2 Bulan	12 Bulan	102.578.000,00
JUMLAH PAGU											16.266.711.398,00



C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berpijak kepada visi, misi, tujuan, sasaran, RPJMD Kota Bandar Lampung pada periode 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika membawahi 3 (tiga) urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian berdasarkan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung telah menetapkan beberapa program unggulan, yaitu:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pada program dan kegiatan ini menitik beratkan pada pelaksanaan kegiatan diseminasi serta sosialisasi hasil kebijakan dan pembangunan, pelaksanaan, perencanaan dan implementasi pemanfaatan TIK pada pemerintah dan publik, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur di bidang TIK dan pengelolaan media center. Sebagaimana dijabarkan pada uraian berikut:

- 1) Pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- 2) Pengelolaan Media Center sebagai pusat informasi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- 3) Pengelolaan Media Penyajian Data dan Informasi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- 4) Pengelolaan infrastruktur dan aplikasi berbasis TIK.

2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Pada program dan kegiatan ini menitik beratkan pada pelaksanaan kegiatan, Penyerapan aspirasi public dan diseminasi informasi publik serta sosialisasi hasil kebijakan dan pembangunan. Sebagaimana dijabarkan pada uraian berikut:



- 1) Pengelolaan kegiatan sosialisasi kebijakan oleh pembangunan yang telah dan akan dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- 2) Pengelolaan sistem diseminasi informasi publik lewat pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan pertunjukan rakyat.
- 3) Pengelolaan kegiatan kemitraan dengan media massa dan penyiaran serta badan kehumasan antar instansi.

3) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

Program dan kegiatan ini menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap usaha pos, telekomunikasi dan informatika sebagaimana dijabarkan pada uraian berikut:

Pengelolaan pelaksanaan pengawasan, pendataan, penelitian, sertifikasi dan rekomendasi terhadap jenis kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan informatika.

2. Urusan Statistik

• Program Pengembangan Sistem Manajemen Data

Pada program dan kegiatan ini menitik beratkan pada pengelolaan data dan informasi sebagaimana dijabarkan pada uraian berikut: Pengelolaan data dan informasi public yang berkaitan dengan politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

3. Urusan Persandian

• Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa

Pada program dan kegiatan ini menitik beratkan pada pengelolaan dan monitoring implementasi pemanfaatan TIK pada pemerintahan, pembinaan terhadap usaha pos, telekomunikasi dan informatika sebagaimana dijabarkan pada uraian berikut:



- a. Pengelolaan sistem penyerapan aspirasi masyarakat lewat pemanfaatan TIK.
- b. Pengelolaan kegiatan implementasi dan pengembangan infrastruktur dan aplikasi berbasis TIK serta pusat data elektronik dalam implementasi E-Government untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Pengelolaan kegiatan implementasi dan pengembangan infrastruktur akses informasi untuk masyarakat.
- d. Pengelolaan kegiatan pembangunan dan pengembangan pusat pelatihan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan TIK.

D. KEGIATAN TAHUNAN

Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari sasaran Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung untuk periode 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah tersebut, maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022, Adapun Penetapan Kinerja disajikan sebagaimana Lampiran I.

1. Perjanjian Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang dibentuk pada bulan Juli 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2016



tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, pada tahun 2021 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung mengelola Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar tugas kepala daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Didalam melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar tersebut, pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung melaksanakan Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merumuskan 5 (lima) Program dengan 12 (duabelas) kegiatan pendukung dengan total pagu anggaran setelah perubahan (APBDP-TA.2022) sebesar Rp16.266.711.398,00.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Urusan Komunikasi dan Informatika	3	10	28
Urusan Statistik	1	1	4
Urusan Persandian	1	1	3
Total	5	12	35



URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah
 - (1) Kegiatan Perencananaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - (3) KegiatanAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Peyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD
 - (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - (6) KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - c. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 3) Program Aplikasi Informatika
 - (1) Kegiatan Pengelolaan Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah



- (2) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

URUSAN STATISTIK

- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - c. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - d. Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur

URUSAN PERSANDIAN

- 5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merumuskan 5 (lima) Program dengan 12 (duabelas) kegiatan pendukung dengan total pagu anggaran setelah perubahan (APBDP-TA.2022) sebesar Rp16.266.711.398,00 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Retribusi Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
2.	Belanja Daerah	16.266.711.398,00	13.734.151.264,00	(2.532.560.134,00)	(15,56)
1.1.	Belanja Operasi	14.795.711.398,00	12.593.191.264,00	(2.202.520.134,00)	(14,88)
	Belanja Pegawai	3.647.319.004,00	3.495.714.487,00	(151.604.517,00)	(4,15)
	Belanja Barang dan Jasa	10.501.892.394,00	9.007.476.777,00	(1.494.415.617,00)	(14,23)
	Belanja Hibah	645.500.000,00	90.000.000,00	(556.500.000,00)	(86,07)
1.2.	Belanja Modal	1.472.000.000,00	1.140.960.000,00	(330.040.000,00)	(22,43)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.316.000.000,00	990.960.000,00	(325.040.000,00)	(24,69)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.000.000,00	150.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,22)
	Jumlah Belanja Daerah	16.266.711.398,00	13.734.151.264,00	(2.532.560.134,00)	(15,56)
	Surplus /Defisit	(13.420.408.758,00)	(12.934.468.264,00)	485.940.494,00	(3,62)
3.	Pembiayaan Daerah	0	0	0	0
	Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	0	0	0	0
	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran	(13.420.408.758,00)	(12.934.468.264,00)	485.940.494,00	(3,62)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup ; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam Bab sebelumnya mengenai Perencanaan Kinerja Tahun 2022.

Untuk mengukur kinerja sasaran, pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- ✓ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- ✓ Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$



Kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Kategorisasi Kinerja (Penentuan Posisi)
berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realiasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh DISKOMINFO Kota Bandar Lampung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis DISKOMINFO Kota Bandar Lampung beserta target dan capaian realisasinya Tahun 2022 disajikan sebagaiberikut.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis DISKOMINFO
Kota Bandar Lampung Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IKU										
1. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase Informasi Penyeleenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95	95	95	95	95	95	95	95
2	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	80	80	85	85	90	100	100	100
3	Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik	Persen	90	90	95	95	95	95	95	95
2. STATISTIK										

4	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan baik	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
---	---	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IKK										
1.PERSANDIAN										
1	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang baik	Persen	80	85	95	95	95	95	95	95

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI

Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat

MISI 6

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi

NO.		TUJUAN		SASARAN		STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN
1	6.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1	Meningkatkan kualitas Perencanaan, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1	Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
							2	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
							3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
							4	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Asset Daerah serta Kepatuhan terhadap Laporan Keuangan
			6.1.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1	Meningkatnya Akses Masyarakat dalam Informasi dan Layanan	1	Mengembangkan E-Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
							2	Memperkuat dan Memperluas

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

							Jangkauan Teknologi Komunikasi dan Informatika
						3	Menciptakan Inovasi Layanan di Segala Bidang
						4	Mengembangkan Penelitian untuk Inovasi Daerah
						5	Memfaatkan Teknologi Informasi untuk Memberikan Informasi dan Pelayanan Publik

Tabel 3.4.

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung

NO.		TUJUAN		SASARAN		STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja pada Tahun	
								Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)
1	6.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1	Meningkatkan kualitas Perencanaan, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	T	ST
			6.1.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1	Meningkatnya Akses Masyarakat dalam Informasi dan Layanan	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	100,00	100,00

Tabel 3.5
Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis DISKOMINFO
Kota Bandar Lampung Tahun 2022
Berdasarkan RPJMD 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Sub Kegiatan Program, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
								Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Rp	K	16	17	
	Terwujudnya infrastruktur yang dapat mendukung pemanfaatan telekomunikasi, Informatika dan komunikasi guna peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kota bandar lampung			Presentase pemanfaatan telekomunikasi, Informatika dan Komunikasi di pemerintah kota bandar lampung			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG	
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintah Daerah		Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian			%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencana OPD	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan asn yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan yang tersedia	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan akhir Tahun	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 ls	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang terlatih sesuai dengan tugas dan fungsi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pelaksanaan perjalansn dinas kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Meningkatkan sistem berbasis teknologi dan informasi untuk pelayanan publik			Cakupan pengembangan informasi publik kota bandar lampung	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
				PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
			Rumus : jumlah informasi publik yg terpublikasi dibagi jumlah OPD *100	Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Presentase pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	12 Bulan 1 Paket	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

				Pengelolaan Media Komunikasi publik	jumlah media informasi	12 Bulan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
				Pelayanan Informasi Publik	jumlah sistem informasi pelayanan publik yang dikelola secara terpadu	1 Paket	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui PPID dan website	12 bulan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah	1 Paket	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
		Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, Informatika dan komunikasi yg terpadu			Cakupan layanan telekomunikasi, informatika dan komunikasi	%	80%	80%	85%	85%	90%	100%	100%	100%			
					Presentase kontribusi retribusi pengawasan dan pengendalian menera telekomunikasi terhadap PAD	%	0,15 %	0,25 %	0,35 %	0,45 %	0,55%	0,65 %	0,75 %	0,75%			
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan layanan Publik Yang berfungsi Baik	%	80%	80%	85%	85%	90%	100%	100%	100%			
					Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik												
				Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	1 Ls	80%	80%	85%	85%	90%	100%	100%	100%			

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	1 Ls	80%	80%	85%	85%	90%	100%	100%	100%			
				Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikas (SIDALMENTAL)	1 Ls 12 bulan 12 Bulan	80%	80%	85%	85%	90%	100%	100%	100%			
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi	1 Ls	80%	80%	85%	85%	90%	100%	100%	100%			
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis database yang terintegrasi	12 Bulan	80%	80%	85%	85%	90%	100%	100%	100%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Pengkajian dan Penelitian Sistem Keamanan data	12 Bulan	80%	80%	85%	85%	90%	100%	100%	100%			
		Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral			Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Update	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
				Program Penyelenggaraan Stastistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	pengembangan dan implementasi sistem informasi data statistik	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

				Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Operasional Literasi data dan Informasi	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
				Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah jenis database yang terintegrasi	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Penyusunan Data Sektoral	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
				Pembangunan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur data dan informasi yang terpelihara	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
		Meningkatkan Layanan Keamanan Informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna			Persentase Layanan Keamanan Informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna	%	80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	%	80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

				Penetapan Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah kota yang dikelola dengan baik	%	80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Website	%	80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Call Center dan Persandian untuk keaamanan informasi	%	80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%				

Tabel 3.6.

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2022

o.	Urusan Pemerintahan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kebijakan (Secara Keseluruhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Terbangunnya Infrastruktur Telekomunikasi Terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	98%	95%
					2	Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Serat Optikd dalam Gedung, Antar Gedung dan dalam Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98%	95%
						Tersedianya Akses Informasi Melalui Internet di Setiap SKPD di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Bulan	12 Bulan
					4	Tersedianya Akses Internet Gratis Bagi Publik	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Bulan	12 Bulan
					5	Tersedianya Pusat Data dan Informasi (Data Center)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	95%
					6	Tersedianya Pusat	Sub Kegiatan Penyediaan	2 Bulan	12 Bulan

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

					Monitoring dan Kendali (Command Center)	Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN yang Tersedia		
					Tersedianya Sistem Administrasi Lesspaper Dalam Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan	2 Bulan	12 Bulan
				8	Tersedianya Sistem Komunikasi Berbasis TIK Seperti E-Mail, Mobile Instant Messenger dll.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir OPD	2 Bulan	12 Bulan
				9	Meningkatkan Ketersediaan Website SKPD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98%	95%
				10	Pengaturan Domain dan Subdomain	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	2 Bulan	12 Bulan
				11	Tersedianya Sistem Informasi Berbasis TIK untuk Pelayanan Publik.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%
				12	Tersedianya Sistem Monitoring Kota dengan Pemanfaatan TIK	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	2 Bulan	12 Bulan
				13	Tersedianya Sistem Informasi berbasis TIK yang dapat Menunjang Pelayanan Publik	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	2 Bulan	12 Bulan
				14	Tersedianya Sistem Informasi Terpadu Tentang Kota Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat	2 Bulan	12 Bulan
				15	Tersedianya Database yang Lengkap Tentang Potensi Daerah di Berbagai sektor (Pariwisata, Jasa dan Perdagangan)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 Bulan	12 Bulan

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

				16	Tumbuhnya Ekonomi Kreatif di Bidang Komunikasi dan Informatika	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Bulan	12 Bulan
				17	Mendorong Pengembangan E- Commerce	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	2 Bulan	12 Bulan
					edianyaSistem Informasi yang dapat Mendorong Peningkatan PAD	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%
				19	Peningkatan Metodekerja Pengelolaan Informasi di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Jumlah Mebel	2 Bulan	12 Bulan
				20	Tersusunnya Pola Pengelolaan Data dan Informasi yang Aman, Efektif dan Efisien				
				21	Terjalinnya Kemitraan Mutualisme dengan Media Massa dalam Diseminasi Informasi	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	2 Bulan	2 Bulan
				22	Tersedianya Konten Informasi Pembangunan Daerah Baik dalam Format Digital Atau Cetak (Teks, Gambar dan Video)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Bulan	12 Bulan
				23	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Media Informasi Publik (Elektronik, Luar Ruang, Cetak dan Online)	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Bulan	12 Bulan
				24	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor	98%	95%
				25	Terlaksananya Penyelenggaraan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Terpeliharanya Kendaraan	2 Bulan	12 Bulan

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

						Layanan Pos dan Telekomunikasi yang Handal	Pemeliharaan, Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
					26	Tersedianya Regulasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi Sesuai Peraturan Perundangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	2 Bulan	12 Bulan
					27	Terjalannya Kemitraan Strategis dengan Para Penyelenggara Layanan Dibidang Pos dan Telekomunikasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Peralatan Kantor	2 Bulan	12 Bulan
					28	Terlaksananya Edukasi Terkait Penyelenggaraan Layananpos dan Telekomunikasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 Bulan	12 Bulan
							Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Pendukung Gedung Kantor	2 Bulan	12 Bulan
		Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	tingkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi , Informasi dan Komunikasi)	29	Terbangunnya Pusat Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	100%	100%
					30	Terlaksananya Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Keahlian ASN	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	100%
						Terlaksananya Sosialisasi Danedukasi Tentang	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan	2 Bulan	12 Bulan

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

						Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Teknologi		Media Komunikasi Publik		
							Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	2 Bulan	12 Bulan
							Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	2 Bulan	12 Bulan
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	2 Bulan	12 Bulan
							PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	85%	70%
								Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	95%	90%
							Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	95%	90%
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem	Tersedianya Koneksi Internet	2 Bulan	12 Bulan

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

						Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik		
						Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	95%	12%
						Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi	2 Bulan	12 Bulan
						Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Jumlah Jenis Data Base	2 Bulan	12 Bulan
	SAN STATISTIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada
						Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terintegrasinya Jenis Data Base	2 Bulan	12 Bulan
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegraasi	Terlakssanya Operasional Literasi Data dan Informas	2 Bulan	12 Bulan
						Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral	2 Bulan	12 Bulan
						Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Terpeliharanya Jumlah Infrastruktur Data dan Informasi	2 Bulan	12 Bulan
	SAN PERSANDIAN					PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentasae Pengamanan	95%	90%

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

							PERSANDIAN PENGAMANAN INFORMASI	UNTUK Informasi Daerah Ynag Terseleenggara Baik		
							Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	95%	90%
							Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemaan dan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota yang Terkelola dengan Baik	95%	90%
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengebangan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	2 Bulan	12 Bulan
							Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Call Center dan Persandian untuk Keamanan Informasi	2 Bulan	12 Bulan

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS

Tabel : 3.7.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Usaha Pemerintahan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Beban Anggaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel, Transparansi dan Inovatif	kinerja Akuntabilitas dan Keuangan	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Infrastruktur Telekomunikasi Terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah	98%	95%	1. Tidak sesuai rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi Akibat Covid 19)	1. Penetapan cash budget disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan 2. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi
				2	Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Serat Optik di dalam Gedung, Antar Gedung dan dalam Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	hanya Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98%	95%	-	-
					Ya Akses Informasi Melalui Internet di Setiap SKPD di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulan	12 Bulan	-	-
				4	Tersedianya Akses Internet Gratis Bagi Publik	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulan	12 Bulan	-	-
				5	Tersedianya Pusat Data dan Informasi (Data Center)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	hanya Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	98%	95%	-	-
				6	Tersedianya Pusat Monitoring dan Kendali (Command Center)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	Bulan	12 Bulan	-	-
					Ya Sistem Administrasi Lesspaper Dalam Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	hanya Administrasi Keuangan	Bulan	12 Bulan	-	-
				8	Tersedianya Sistem Komunikasi Berbasis TIK Seperti E-Mail, Mobile Instant Messenger dll.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ya Laporan Keuangan Akhir OPD	Bulan	12 Bulan	-	-
				9	Meningkatkan Ketersediaan Website SKPD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	hanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98%	95%	-	-
				10	Pengaturan Domain dan Subdomain	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	Bulan	12 Bulan	-	-
				11	Tersedianya Sistem Informasi Berbasis TIK untuk Pelayanan Publik.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	hanya Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%	-	-
				12	Tersedianya Sistem Monitoring Kota dengan Pemanfaatan TIK	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ya Alat Tulis Kantor	Bulan	12 Bulan	-	-
				13	Tersedianya Sistem Informasiberbasis TIK yang dapat Menunjang Pelayanan Publik	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	Bulan	12 Bulan	-	-
				14	Tersedianya Sistem Informasi Terpadu Tentang Kota Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ya Layanan Makan dan Minum Rapat	Bulan	12 Bulan	-	-
				15	Tersedianya Database yang Lengkap Tentang Potensi Daerah di Berbagai sektor (Pariwisata, Jasa dan Perdagangan)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12 Bulan	-	-
				16	Tumbuhnya Ekonomi Kreatif di Bidang Komunikasi dan Informatika	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12 Bulan	-	-

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

					17	Mendorong Pengembangan E- Commerce	atan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	anya Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12 Bulan	-	-	-
						ya Sistem Informasi yang dapat Mendorong Peningkatan PAD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nya Kebutuhan Inventaris Kantor	8%	95%	-	-	-
					19	Peningkatan Metode kerja Pengelolaan Informasi di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	atan Pengadaan Mebel	nya Jumlah Mebel	Bulan	12 Bulan	-	-	-
					20	Tersusunnya Pola Pengelolaan Data dan Informasi yang Aman, Efektif dan Efisien					-	-	-
					21	Terjalannya Kemitraan Mutualisme dengan Media Massa dalam Diseminasi Informasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Bulan	12 Bulan	-	-	-
					22	Tersedianya Konten Informasi Pembangunan Daerah Baik dalam Format Digital Atau Cetak (Teks, Gambar dan Video)	atan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12 Bulan	-	-	-
					23	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Media Informasi Publik (Elektronik, Luar Ruang, Cetak dan Online)	atan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12 Bulan	-	-	-
					24	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	anya Inventaris Kantor	8%	95%	-	-	-
					25	Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi yang Handal	atan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	anya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12 Bulan	-	-	-
					26	Tersedianya Regulasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	atan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	anya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12 Bulan	-	-	-
					27	Terjalannya Kemitraan Strategis dengan Para Penyelenggara Layanan Didedikasikan Pos dan Telekomunikasi	atan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	anya Jumlah Peralatan Kantor	Bulan	12 Bulan	-	-	-
					28	Terlaksananya Edukasi Terkait Penyelenggaraan Layanan pos dan Telekomunikasi	atan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	anya Gedung Kantor	Bulan	12 Bulan	-	-	-
							atan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	anya Jumlah Pendukung Gedung Kantor	Bulan	12 Bulan	-	-	-
		Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel, Transparansi dan Inovatif	nya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	29	Terbangunnya Pusat Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi	M PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	se Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	00%	100%	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi. 2. Tidak terlaksananya kerja sama dengan salah satu media online dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh dinas komunikasi dan informatika	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi 2. Lebih selektif dalam memilih media online untuk melakukan kerjasama di dinas komunikasi dan informatika.	
					30	Terlaksananya Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Keahlian ASN	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	se Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	00%	100%	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi. 2. Tidak terlaksananya kerja sama dengan salah satu media online dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh dinas komunikasi dan informatika	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi 2. Lebih selektif dalam memilih media online untuk melakukan kerjasama di dinas komunikasi dan informatika.	
						nya Sosialisasi Dan edukasi Tentang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Teknologi	atan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	nya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Bulan	12 Bulan	-	-	-
							atan Pelayanan Informasi Publik	ya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	Bulan	12 Bulan	-	-	-
							atan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	ya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPD dan Website	Bulan	12 Bulan	-	-	-
							egiatan Penyelenggaraan Hubungan	nya Penyebarluasan Informasi	Bulan	12 Bulan	-	-	-

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

						Masyarakat, Media dan Kemiraan Komunitas	Pembangunan Daerah												
						M APLIKASI INFORMATIKA	se Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	85%	70%	<ol style="list-style-type: none"> Tidak sesuai rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi Pengurangan Pagu Anggaran (Rasionalisasi) Tidak sesuai rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget yang diusulkan dengan cash budget yang ditetapkan, sehingga banyak kegiatan yang tertambat dilaksanakan atau direalisasikan pendanaannya Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat perlu ditingkatkan Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi) Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan cash budget disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan Terjangkau induk jaringan komunikasi beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi Penetapan cash budget disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam usulan cash budget Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi) Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan publik 								
							se Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	85%	90%										
						Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	nya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	85%	90%	<ol style="list-style-type: none"> Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat perlu ditingkatkan Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan publik Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi) sehingga ada item yang tidak dilaksanakan pada kegiatan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi 								
						laksanaan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	nya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	Bulan	12 Bulan										
						Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	se Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	85%	12%	<ol style="list-style-type: none"> Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat perlu ditingkatkan Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparaturnya dan masyarakat Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien Terselenggaranya pemerataan 								

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

												4. Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi) sehingga ada item yang tidak dilaksanakan pada kegiatan tersebut. 5. Adanya perubahan data pada Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public. 4. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi 5. Pendataan Ulang		
							atan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Menara Telekomunikasi	Bulan	12 Bulan		Adanya perubahan data pada Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	Pendataan Ulang		-
							atan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	isinya Jumlah Jenis Data Base	Bulan	12 Bulan		1. Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan 2. Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien 3. Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public 4. Pengurangan Pagu anggaran (Rasionalisasi) ada item yang tidak dilaksanakan pada kegiatan tersebut.	1. Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat 2. Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien 3. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan public. 4. Pagu Kegiatan tidak dirasionalisasi		-
STATISTIK							IM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	nya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada		-	-		-
							Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	angan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada		-	-		-
							giatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	isinya Jenis Data Base	Bulan	12 Bulan		-	-		-
							atan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	nya Operasional Literasi Data dan Informas	Bulan	12 Bulan		-	-		-
							giatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	nya Data Sektoral	Bulan	12 Bulan		-	-		-
							atan Pengembangan Infrastruktur	anya Jumlah Infrastruktur Data dan Informasi	Bulan	12 Bulan		-	-		-
PERSANDIAN							IM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	saes Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	85%	90%		Adanya perubahan data pada data POSTELSUS dan Penyiaran	Pendataan Ulang		-
							Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	saes Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	85%	90%		Adanya perubahan data pada data POSTELSUS dan Penyiaran	Pendataan Ulang		-
							atan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	saes Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Kota yang Terkelola dengan Baik	85%	90%		Adanya perubahan data pada data POSTELSUS dan Penyiaran	Pendataan Ulang		-
							atan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	saes Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	Bulan	12 Bulan		-	-		-
							giatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	call Center dan Persandian untuk Keamanan Informasi	Bulan	12 Bulan		-	-		-

**Tabel : .3.8
REALISASI TAPKIN DAN PENDANAAN**

o.	urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan	target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Murni	Perubahan	Realisasi Perubahan	% Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Bertambah/Berkurang 9=8-7
1	2	3	4	5	6	7	8				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-	10.459.466.978,55	16.266.711.398,00	13.735.505.134,00	84,44		5.807.244.419,45
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	9.744.388.978,55	15.512.133.398,00	13.415.188.797,00	86,48		5.767.744.419,55
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	95%	4.310.072.078,55	5.178.180.428,00	4.551.807.217,00	87,90	626.373.211,00	868.108.349,45
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98%	95%	60.000.000,00	60.000.000,00	7.125.000,00	11,88	52.875.000,00	0
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	3.575.000,00	11,92	26.425.000,00	0
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	3.550.000,00	11,83	26.450.000,00	0
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	98%	95%	3.391.653.566,55	3.677.869.004,00	3.526.940.857,00	95,90	150.928.147,00	286.215.437,45
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	3.155.303.566,55	3.441.519.004,00	3.298.168.357,00	95,83	143.350.647,00	286.215.437,45
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	206.350.000,00	206.350.000,00	198.900.000,00	96,39	7.450.000,00	0
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir OPD	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	29.872.500,00	99,56	127.500,00	0

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

		Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98%	95%	15.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	33,33	30.000.000,00	30.000.000,00
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	33,33	30.000.000,00	30.000.000,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%	165.942.500,00	245.817.500,00	191.734.861,00	78,00	54.082.639,00	(79.875.000,00)
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.777.000,00	24.777.000,00	24.193.788,00	97,65	583.212,00	0
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	9.339.500,00	9.339.500,00	9.323.670,00	99,83	15.830,00	0
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat	12 Bulan	12 Bulan	29.206.000,00	96.206.000,00	44.712.500,00	46,48	51.493.500,00	67.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	22.720.000,00	22.720.000,00	22.382.400,00	98,51	337.600,00	0
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100	0	0
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	67.900.000,00	80.775.000,00	79.122.503,00	97,95	1.652.497,00	12.875.000,00
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%	50.000.000,00	125.000.000,00	0	0	125.000.000,00	75.000.000,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Jumlah Mebel	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	125.000.000,00	0	0	125.000.000,00	75.000.000,00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	12 Bulan	12 Bulan	489.000.000,00	879.000.000,00	730.000.000,00	83,05	149.000.000,00	(390.000.000,00)
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0
		Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	487.000.000,00	877.000.000,00	730.000.000,00	83,24	147.000.000,00	390.000.000,00
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor	98%	95%	138.476.012,00	145.493.924,00	81.006.499,00	55,68	64.487.425,00	7.017.912,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	33.532.088,00	40.550.000,00	37.453.000,00	92,36	3.097.000,00	7.017.912,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	23.000.000,00	23.000.000,00	21.553.499,00	93,71	1.446.501,00	0
		Kegiatan Pemeliharaan	Terpeliharanya Jumlah	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	0	0

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

	Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor									
	Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	59.443.924,00	59.443.924,00	0	0	59.443.924,00	0	
	Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Pendukung Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	93,33	500.000,00	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	100%	100%	3.701.894.900,00	5.630.975.100,00	4.210.669.156,00	74,78	1.420.305.944,00	1.929.080.200,00	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	100%	3.701.894.900,00	5.630.975.100,00	4.210.669.156,00	74,78	1.420.305.944,00	1.929.080.200,00	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	3.600.000,00	10,00	32.400.000,00	0	
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	12 Bulan	12 Bulan	1.786.712.000,00	2.273.712.000,00	2.105.607.456,00	92,61	168.104.544,00	1487.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	20.900.000,00	20,90	79.100.000,00	0	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.779.182.900,00	3.221.263.100,00	2.080.561.700,00	64,59	452.201.400,00	1.442.080.200,00	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	85%	70%	1.732.422.000,00	4.702.977.870,00	4.652.712.424,00	98,93	50.265.466,00	2.970.555.870,00	
		Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	95%	90%							
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	95%	90%	1.145.000.000,00	3.338.455.870,00	3.327.641.722,00	99,68	10.814.148,00	2.193.455.870,00	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

		Kabupaten/Kota									
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	12 Bulan	12 Bulan	1.145.000.000,00	3.338.455.870,00	3.327.641.722,00	99,68	10.814.148,00	2.193.455.870,00
		Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Pengedalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	95%	12%	587.422.000,00	1.364.522.000,00	1.325.070.702,00	97,11	39.451.298,00	777.100.000,00
		Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	156.422.000,00	156.422.000,00	133.770.702,00	85,52	22.651.298,00	0
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Jumlah Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	431.000.000,00	1.208.100.000,00	1.191.300.000,00	98,61	16.800.000,00	777.100.000,00
	AN STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada	277.500.000,00	277.500.000,00	66.625.000,00	24,00	210.875.000,00	0
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada	277.500.000,00	277.500.000,00	66.625.000,00	24,00	210.875.000,00	0
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terintegrasinya Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	66.600.000,00	66.600.000,00	8.400.000,00	12,61	66.600.000,00	0
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Operasional Literasi Data dan Informas	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0	0
		Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	7.500.000,00	5,00	142.500.000,00	0
		Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Terpeliharanya Jumlah Infrastruktur Data dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	22.500.000,00	22.500.000,00	20.725.000,00	92,11	1.775.000,00	0
	AN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	95%	90%	437.578.000,00	477.078.000,00	253.691.337,00	53,18	223.386.663,00	39.500.000,00
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	95%	90%	437.578.000,00	477.078.000,00	253.691.337,00	53,18	223.386.663,00	39.500.000,00
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Persentase Kemaan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota yang	95%	90%	40.000.000,00	40.000.000,00	31.763.337,00	79,41	8.236.663,00	0

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dengan Baik								
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengebangan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	12 Bulan	12 Bulan	295.000.000,00	334.500.000,00	120.150.000,00	35,92	214.350.000,00	39.500.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Call Center dan Persandian untuk Keamanan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	102.578.000,00	102.578.000,00	101.778.000,00	99,22	800.000,00	0
JUMLAH					10.459.466.978,55	16.266.711.398,00	13.735.505.134,00	84,44	2.531.206.264,00	5.807.244.419,45

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah
 - (1) Kegiatan Perencananaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - (3) KegiatanAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Peyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinaasi Konsultasi SKPD
 - (5) Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - (6) KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - c. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3. Program Aplikasi Informatika
 - (1) Kegiatan Pengelolaan Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - (2) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

URUSAN STATISTIK

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - c. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - d. Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur

URUSAN PERSANDIAN

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung merumuskan 5 (lima) Program dengan 12 (duabelas) kegiatan pendukung dengan total pagu anggaran setelah perubahan (APBDP-TA.2022) sebesar Rp16.266.711.398,00 yang terdiri dari :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/Berkurang	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Retribusi Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.846.302.640,00	799.683.000,00	(2.046.619.640,00)	(71,90)
2.	Belanja Daerah	16.266.711.398,00	13.734.151.264,00	(2.532.560.134,00)	(15,56)
1.1.	Belanja Operasi	14.795.711.398,00	12.593.191.264,00	(2.202.520.134,00)	(14,88)
	Belanja Pegawai	3.647.319.004,00	3.495.714.487,00	(151.604.517,00)	(4,15)
	Belanja Barang dan Jasa	10.501.892.394,00	9.007.476.777,00	(1.494.415.617,00)	(14,23)
	Belanja Hibah	645.500.000,00	90.000.000,00	(556.500.000,00)	(86,07)
1.2.	Belanja Modal	1.472.000.000,00	1.140.960.000,00	(330.040.000,00)	(22,43)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.316.000.000,00	990.960.000,00	(325.040.000,00)	(24,69)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.000.000,00	150.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,22)
	Jumlah Belanja Daerah	16.266.711.398,00	13.734.151.264,00	(2.532.560.134,00)	(15,56)
	Surplus /Defisit	(13.420.408.758,00)	(12.934.468.264,00)	485.940.494,00	(3,62)
3.	Pembiayaan Daerah	0	0	0	0
	Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	0	0	0	0
	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran	(13.420.408.758,00)	(12.934.468.264,00)	485.940.494,00	(3,62)

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.5.178.180.428,00 terserap sebesar Rp.4.551.807.217,00 atau sebesar 87,90% didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:
 - (1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.60.000.000 terserap sebesar Rp.7.125.000,00 atau sebesar 11,88%. Hasil yang dicapai adalah Realisasi Kinerja Dinas
 - (2) Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang dapat dipertanggung jawabkan berupa dokumen LPJ, LPPD dan LAKIP Tahun 2022 (realisasi kinerja 100%) dan Tersusunnya Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 terserap sebesar Rp.3.575.000,00 atau sebesar 11,92%. Hasil yang dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 terserap sebesar Rp.3.550.000,00 atau sebesar 11,83 %. Hasil yang dicapai adalah Tersusunnya Dokumen Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang dapat dipertanggung jawabkan berupa dokumen LPJ, LPPD dan LAKIP Tahun 2022 (realisasi kinerja 100%).
- (3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.667.869.094,00 terserap sebesar Rp.3.526.940.857,00 atau sebesar 95,90%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD(realisasi kinerja 100%), dan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.441.519.004,00 terserap sebesar Rp.3.298.168.357,00 atau sebesar 95,83%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN (realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.206.350.000,00 terserap sebesar Rp.198.900.000,00 atau sebesar 96,39%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (realisasi kinerja 100%).

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 terserap sebesar Rp.29.872.500,00 atau sebesar 99,56%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (realisasi kinerja 100%).

- (4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 45.000.000 terserap sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 33,33%. Hasil yang dicapai adalah terlatihnya jumlah pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsidengan dukungan anggaran sebesar dengan dukungan anggaran sebesar Rp.45.000.000 terserap sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 33,33%. Hasil yang dicapai adalah terlatihnya jumlah pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. (realisasi kinerja 95,00%).

- (5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.245.817.500,00 terserap sebesar Rp.191.734.861,00 atau sebesar 78,00%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (realisasi kinerja 98%). Didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp.24.777.000,00 terserap sebesar Rp.24.193.788,00 atau sebesar 97,65%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan dukungan anggaran sebesar Rp.9.339.500.000,00 terserap sebesar Rp.9.323.670,00 atau sebesar 99,83%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga SKPD (realisasi kinerja 100%).
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp.96.206.000,00 terserap sebesar

- Rp.44.712.500,00 atau sebesar 46,48%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor (realisasi kinerja 100%).
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.22.720.000,00 terserap sebesar Rp.22.382.400,00 atau sebesar 98,51%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (realisasi kinerja 100%).
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.12.000.000,00 terserap dicapai adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (realisasi kinerja 100%).
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.80.775.000,00 terserap sebesar Rp.79.122.503,00 atau sebesar 97,95%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD (realisasi kinerja 100%).
- (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 0%). Didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan dukungan anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 100%).
- (7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 879.000.000,00 terserap sebesar Rp.730.000.000,00 atau sebesar 83,05%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah (realisasi kinerja 84,46%). Didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.000.000,00 terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 0%).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 877.000.000,00 terserap sebesar Rp. 730.000.000,00 atau sebesar 83,24%. Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (realisasi kinerja 100%).

(8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.145.493.924,00 terserap sebesar Rp.81.006.499,00 atau sebesar 55,68%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (realisasi kinerja 100%). Didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatandengan dukungan anggaran sebesar Rp.40.550.000,00 terserap sebesar Rp.37.453.000,00 atau sebesar 92,36%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan(realisasi kinerja 100%).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.23.000.000,00 terserap sebesar Rp.21.553.499,00 atau sebesar 93,71%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan (realisasi kinerja 100%).
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp.15.000.000 terserap sebesar Rp.15.000.000 atau sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (realisasi kinerja 100%).
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp.59.443.924,00 terserap sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0%. Hasil yang dicapai adalah Hasil yang dicapai adalah Sub Kegiatan ini tidak terlaksana (realisasi kinerja 0%).
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dukungan anggaran sebesar Rp.7.500.000,00 terserap sebesar Rp.7.000.000,00 atau sebesar 93,33%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (realisasi kinerja 100%).
- 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.630.975.100,00 terserap sebesar Rp.4.210.669.156,00 atau sebesar 74,78% didukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan 4 (empat) sub Kegiatan:
- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.36.000.000,00 terserap sebesar Rp.3.600.000,00 atau sebesar 10,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung terkait Kota Layak Anak (realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.273.712.000,00 terserap sebesar Rp.2.105.607.456,00

- atau sebesar 92,61%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 100%).
- c. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 terserap sebesar Rp.20.900.000,00 atau sebesar 20,90%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Sekretariat PPID (realisasi kinerja 100%).
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.221.263.100,00 terserap sebesar Rp.2.080.561.700,00 atau sebesar 64,59%. Hasil yang dicapai adalah Tersebaranya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(realisasi kinerja 100%).
- 3) Program Aplikasi Informatika didukung dengan anggaran sebesar Rp.4.702.977.870,00 terserap sebesar Rp.4.652.712.424,00 atau sebesar 98,93% didukung dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
- (1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.338.455.870,00 terserap sebesar Rp.3.327.641.722,00 atau sebesar 99,68%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya koneksi jaringan internet lingkup sekretariat Pemkot dan area publik (realisasi kinerja 95%). Didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Infra Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.338.455.870,00 terserap sebesar Rp.3.327.641.722,00 atau sebesar 99,68%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Area Publik dan Sekretariat Pemkot Bandar Lampung (realisasi kinerja 95%).
 - (2) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1,364.522.000,00 terserap sebesar Rp.1.325.070.702,00 atau sebesar 97,11%. Hasil yang dicapai adalah Persentase hosting dan maintenance sistem informasi pengendalian menara telekomunikasi

SIDALMENTEL (realisasi kinerja 95%). Didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi dengan dukungan anggaran sebesar Rp.156.422.000,00 terserap sebesar Rp.133.770.702,00 atau sebesar 85,52%. Hasil yang dicapai adalah Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (realisasi kinerja 95%).
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.208.100.000,00 terserap sebesar Rp.1.191.300.000,00 atau sebesar 98,61%. Hasil yang dicapai adalah terwujudnya pengembangan dan pengelolaan data center (realisasi kinerja 90%).

URUSAN STATISTIK

- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung dengan anggaran sebesar Rp.277.500.000,00 terserap sebesar Rp.66.625.000,00 atau sebesar 24,00% didukung dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 4 (empat) sub Kegiatan:
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan dukungan anggaran sebesar Rp.66.000.000,00 terserap sebesar Rp.8.400.000,00 atau sebesar 12,61%. Hasil yang dicapai adalah Terintegrasinya jenis data base (realisasi kinerja 100%).
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Meningkatkan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 terserap sebesar Rp.30.000.000,00 atau sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Literasi Data dan Informasi (realisasi kinerja 100%).
 - c. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan dukungan anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 terserap sebesar Rp.7.500.000,00

atau sebesar 5,00%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Data Sektoral (realisasi kinerja 100%).

- d. Sub Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dengan dukungan anggaran sebesar Rp.22.500.000,00 terserap sebesar Rp.20.725.000,00 atau sebesar 92,11%. Hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya jumlah infrastruktur data dan informasi (realisasi kinerja 100%).

URUSAN PERSANDIAN

- 5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi didukung dengan anggaran sebesar Rp.477.078.000,00 terserap sebesar Rp.253.691.337,00 atau sebesar 53,18% didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu:
 - (1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.40.000.000,00 terserap sebesar Rp.31.763.337,00 atau sebesar 79,41%. Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Kota yang terkelola dengan baik.
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan dukungan anggaran sebesar Rp.334.500.000,00 terserap sebesar Rp.120.150.000,00 atau sebesar 35,92%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung (realisasi kinerja 95%).
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.102.578.000,00 terserap sebesar Rp.101.778.000,00 atau sebesar 99,22%. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Cyber dan Keamanan Informasi Data Pemerintah Daerah (realisasi kinerja 95%).

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan komunikasi dan informatika adalah :

- (1) Tidak sesuainya rencana kegiatan yang dituangkan dalam cash budget yang diusulkan dengan cash budget yang ditetapkan, sehingga banyak kegiatan yang terlambat dilaksanakan atau direalisasikan pendanaannya.
- (2) Belum memiliki SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan.
- (3) Tidak menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien;
- (4) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi.
- (5) Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatkan pelayanan publik.
- (6) Masih adanya beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak terjangkau induk jaringan komunikasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan statistik adalah :

Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan persandian adalah :

Berupa terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan persandian serta belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah.

2) Solusi

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan komunikasi dan informatika solusinya adalah :

- (1) Penetapan cash budget disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam usulan cash budget.
- (2) Peningkatan SDM yang cukup dan handal dalam kompetensi yang memadai baik dalam urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian dan Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat.
- (3) Menyatunya kantor dengan pusat kendali dan monitoring infrastruktur dan jaringan TIK (data center, network operation center, media center dan command center), hal mana yang akan membuat koordinasi dan pemeliharaan akan lebih efektif dan efisien;
- (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (kendaraan operasional pengawasan, kendaraan operasional peliputan dan kendaraan operasional diseminasi informasi.

- (5) Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik.
- (6) Terjangkau induk jaringan komunikasi beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung yang tidak.

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan statistik solusinya adalah :

Sinkronisasi Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah sehingga perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah dapat dihilangkan.

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang paling mendasar dalam urusan persandian solusinya adalah : Peningkatan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan persandian serta mengoptimalkan pengamanan terhadap sistem sandi daerah.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode 2021-2026.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung mengelola Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar tugas kepala daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Didalam melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan tersebut, pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung melaksanakan 5 (lima) Program dengan 12 (duabelas) kegiatan pendukung dengan total pagu anggaran setelah perubahan (APBDP-TA.2022) sebesar Rp16.266.711.398,00 dengan realisasi sebesar 13.735.505.134,00 atau sebesar 84,44 persen

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan penilaian sendiri (*self assestment*) yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan sangat baik yang secara keseluruhan.



Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan.

B. SARAN

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan wawasan pegawai dengan pendidikan dan pelatihan pada masing-masing unit bidang agar tersedia SDM yang handal dalam bidang Telekomunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Memaksimalkan koordinasi antara instansi dan *Stakeholder* terkait dalam pelaksanaan bidang Telekomunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam mewujudkan *good governance*;
3. Adanya dukungan finansial yang cukup untuk melakukan pembangunan di bidang Telekomunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian guna mencapai tujuan pembangunan di Kota Bandar Lampung;



Laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan kinerja yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2022 dan berbagai masalah yang ada telah dapat diatasi. Semoga tantangan dan masalah yang dihadapi selama ini akan menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

BandarLampung, 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKAS DAN
INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG,**

**ANDY. S.SOS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740204 199703 1 004**





DATA KARTU INVENTARIS BARANG (KIBAR)

No	Kode Lokasi	Kode Barang	No. Reg	Nama Barang	Merek	Tahun Pengadaan	Harga	SKPD
1	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.05.03.03.009	0001	Kursi Putar	Savello	2011	Rp.4.730.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.05.03.03.009	0001	Kursi Pegawai	Futura	2011	Rp.462.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.05.03.03.009	0002	Kursi Pegawai	Futura	2011	Rp.462.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.05.03.03.009	0003	Kursi Pegawai	Futura	2011	Rp.462.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.05.03.03.009	0004	Kursi Pegawai	Futura	2011	Rp.462.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.05.03.03.009	0005	Kursi Pegawai	Futura	2011	Rp.462.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.05.01.04.005	0001	Filling Cabinet	LION	2012	Rp.2.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.05.01.04.005	0002	Filling Cabinet	LION	2012	Rp.2.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.05.01.04.005	0003	Filling Cabinet	LION	2012	Rp.2.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.05.01.04.029	0001	Brankas	ITIOKI	2012	Rp.14.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.05.01.05.088	0001	Proyektor + Layar	HITACHI/CP-X67	2012	Rp.30.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.05.02.06.021	0001	Handycam	Sony	2012	Rp.8.300.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.05.02.06.023	0001	Kamera Digital	NIKON/D3100	2012	Rp.7.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.05.02.06.023	0002	Kamera Digital	NIKON/D3000	2012	Rp.5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.05.02.06.023	0003	Kamera Digital	NIKON/D3000	2012	Rp.5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.01.01.008	0001	ACCESS POINT	Engenius	2012	Rp.2.300.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.01.01.008	0002	ACCESS POINT	Engenius	2012	Rp.2.300.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.01.02.002	0001	Laptop	Dell / N4050	2012	Rp.9.445.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.01.02.002	0002	Laptop	Dell / N4050	2012	Rp.9.445.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.01.02.002	0004	Laptop	Acer/Aspire V5	2012	Rp.7.350.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.01.02.002	0005	Laptop	Acer/Aspire V5	2012	Rp.7.350.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.01.02.002	0006	Laptop	Acer/Aspire V5	2012	Rp.7.350.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
23	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.01.02.002	0007	Laptop	Acer/Aspire V5	2012	Rp.7.350.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
24	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.01.02.002	0008	Laptop	Acer/Aspire V5	2012	Rp.7.350.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
25	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.01.004	0001	Backup Storage	THECUSS/ N199	2012	Rp.8.920.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
26	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.03.001	0001	Komputer Set	Acer / M3970	2012	Rp.8.970.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
27	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.03.001	0002	Komputer Set	Acer / M3970	2012	Rp.8.970.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
28	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.03.001	0003	Komputer Set	Acer / M3970	2012	Rp.8.970.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
29	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.03.003	0003	Printer Inkjet	CANON/ IP 2770	2012	Rp.1.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
30	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.03.014	0002	Lan Tester	-	2012	Rp.669.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
31	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.04.002	0001	Router Switch	Cybercam Router	2012	Rp.77.280.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
32	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.04.002	0002	ROUTER	Mikrotik/RB1100AH	2012	Rp.18.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
33	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.04.033	0001	Konektor Rj45	-	2012	Rp.347.875,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.04.033	0002	Konektor Rj45	-	2012	Rp.347.875,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
35	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.04.033	0003	Konektor Rj45	-	2012	Rp.347.875,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
36	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.10.02.04.033	0004	Konektor Rj45	-	2012	Rp.347.875,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
37	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.06.01.01.096	0001	Tiang Baliho	no	2012	Rp.19.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
38	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.06.01.01.096	0002	Tiang Baliho	no	2012	Rp.19.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
39	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.06.01.01.096	0003	Tiang Baliho	no	2012	Rp.19.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
40	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.06.01.01.096	0004	Tiang Baliho	no	2012	Rp.19.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
41	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.06.01.01.096	0005	Tiang Baliho	no	2012	Rp.19.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
42	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.06.01.02.038	0001	Power Suply	DAKAI	2012	Rp.1.120.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
43	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.06.02.03.005	0001	SWR Tuner	MFJ	2012	Rp.3.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
44	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.06.02.03.005	0003	Instalasi Rig Base Station	-	2012	Rp.5.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
45	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2012	1.3.2.06.02.03.005	0004	Instalasi Rig Mobil Station	-	2012	Rp.2.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

140	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.001	0002	Komputer Set	Acer /AX 1935	2013	Rp.7.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
141	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.001	0003	Komputer Set	Acer /AX 1935	2013	Rp.7.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
142	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.001	0004	Komputer Set	Lenovo H520s	2013	Rp.7.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
143	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.001	0005	Komputer Set	Lenovo H520s	2013	Rp.7.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
144	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.001	0006	Komputer Set	Lenovo H520s	2013	Rp.7.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
145	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.001	0007	Komputer Set	Lenovo H520s	2013	Rp.7.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
146	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.001	0008	Komputer Set	Lenovo H520s	2013	Rp.7.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
147	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.001	0009	Komputer Set	ACER Aspire XC600	2013	Rp.7.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
148	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.001	0010	Komputer Set	HP Pavilion Series	2013	Rp.7.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
149	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.001	0011	Komputer Set	Lenovo H520s	2013	Rp.7.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
150	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.003	0001	Printer Scanner	FUJI XEROK M205B	2013	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
151	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.003	0002	Printer Scanner	Canon MX-Series	2013	Rp.2.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
152	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.003	0003	Printer Scanner	Canon MX-Series	2013	Rp.2.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
153	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.004	0001	Scanner	Canon/Lide	2013	Rp.1.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
154	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.03.018	0001	USB Printer Server	TP Link	2013	Rp.550.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
155	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.04.001	0001	Server	Dell/Power Edge R510	2013	Rp.39.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
156	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.04.004	0001	Modem MIFI	ZTE	2013	Rp.875.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
157	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.10.02.04.004	0002	Modem MIFI	ZTE	2013	Rp.875.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
158	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.01.01.096	0001	Papan Baleho	Konstruksi	2013	Rp.19.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
159	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.01.01.096	0002	Papan Baleho	Konstruksi	2013	Rp.19.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
160	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.01.01.096	0003	Papan Baleho	Konstruksi	2013	Rp.19.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
161	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.01.01.096	0004	Papan Baleho	Konstruksi	2013	Rp.19.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
162	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.01.01.096	0005	Papan Baleho	Konstruksi	2013	Rp.19.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
163	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.01.04.034	0001	Penghancur Kertas	SECURE EzSS-6315A	2013	Rp.1.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
164	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.01.02.126	0002	Kamera Digital	SONY Cybershoot W-710	2013	Rp.1.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
165	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.01.02.126	0003	Kamera Digital	SONY Cybershoot W-710	2013	Rp.1.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
166	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.01.02.126	0004	Kamera Digital	SONY Cybershoot W-710	2013	Rp.1.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
167	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.01.02.126	0005	Kamera Digital	SONY Cybershoot W-710	2013	Rp.1.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
168	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.01.02.126	0006	Kamera Digital	SONY Cybershoot W-710	2013	Rp.1.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
169	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.02.01.001	0001	PABX System	Panasonic	2013	Rp.8.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
170	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2013	1.3.2.06.02.01.022	0001	Media Display Indor	-	2013	Rp.6.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
171	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.02.01.02.003	0001	Minibus	Toyota/Inova	2014	Rp.209.920.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
172	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2017	1.3.2.02.01.02.003	0002	Minibus	Toyota New Avanza 1.3G M	2017	Rp.147.290.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
173	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.03.03.01.071	0001	GPS	Garmin GPS Map/62SC	2015	Rp.4.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
174	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.03.03.01.071	0002	GPS	Garmin GPS Map/62SC	2015	Rp.4.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
175	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.01.04.001	0001	Lemari Besi	Brother	2014	Rp.3.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
176	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.01.04.001	0002	Lemari Besi	Brother	2014	Rp.3.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
177	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.050	0002	Lemari Kayu	-	2014	Rp.3.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
178	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0001	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
179	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0002	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
180	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0003	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
181	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0004	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
182	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0005	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
183	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0006	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
184	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0007	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
185	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0008	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
186	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0009	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

187	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0010	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
188	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0011	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
189	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0012	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
190	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0013	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
191	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0014	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
192	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0015	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
193	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.030	0016	Kursi Rapat	Indachi/D238	2014	Rp.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
194	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.048	0001	Sofa	311Seater	2014	Rp.5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
195	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.04.004	0001	AC Split	LG/1PK	2014	Rp.4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
196	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.04.004	0002	AC Split	LG/1PK	2014	Rp.4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
197	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.04.004	0003	AC Split	LG/1PK	2014	Rp.4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
198	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.04.004	0004	AC Split	LG/1PK	2014	Rp.4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
199	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.04.004	0005	AC Split	LG/1PK	2014	Rp.4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
200	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.04.004	0006	AC Split	LG/1PK	2014	Rp.4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
201	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.06.002	0001	TV LED 42 Inch	Samsung	2014	Rp.32.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
202	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.06.002	0002	TV LED 42 Inch	Samsung	2014	Rp.32.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
203	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.06.008	0001	Sound System Outdoor	Samsung	2014	Rp.9.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
204	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.06.008	0002	Sound System Indoor	Samsung	2014	Rp.6.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
205	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.05.02.06.021	0001	Webcam	Logitech	2015	Rp.2.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
206	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.05.02.06.023	0001	Kamera	Samsung/SM-C101	2015	Rp.6.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
207	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.002	0001	Mini PC	Lenovo	2014	Rp.4.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
208	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0001	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
209	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0002	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
210	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0003	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
211	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0004	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
212	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0005	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
213	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0006	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
214	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0007	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
215	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0008	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
216	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0009	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
217	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0010	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
218	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0011	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
219	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.01.008	0012	Access Point	Unifi/Pico Series	2014	Rp.1.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
220	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.01.02.002	0001	Laptop	Asus/N550JV	2014	Rp.14.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
221	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2017	1.3.2.10.01.02.003	0001	Laptop	ASUS Core i5	2017	Rp.9.300.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
222	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.01.006	0001	KVM	ATEN Series Desktop contr	2014	Rp.4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
223	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.03.003	0001	Printer Dot Matrix	EPSON/LQ 2180	2014	Rp.5.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
224	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.03.003	0002	Printer Dot Matrix	EPSON/LQ Series	2014	Rp.8.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
225	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.04.002	0001	Routerboard	Mikrotik CCR/Series IEC14	2014	Rp.9.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
226	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.04.003	0001	Switch	HP/V1410 Series	2014	Rp.1.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
227	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.04.003	0002	Switch	HP/V1410 Series	2014	Rp.1.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
228	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.04.003	0003	Switch	HP/V1410 Series	2014	Rp.1.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
229	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.04.003	0004	Switch	HP/V1410 Series	2014	Rp.1.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
230	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.04.003	0005	Switch	HP/V1410 Series	2014	Rp.1.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
231	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.04.003	0006	Switch	HP/V1410 Series	2014	Rp.1.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
232	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.04.003	0007	Switch	HP/V1410 Series	2014	Rp.1.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
233	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.04.004	0001	Modem GSM	Huawei	2014	Rp.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

234	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.04.004	0002	Modem GSM	Huawei	2014	Rp.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
235	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.10.02.04.033	0001	Patch Panel	AMP Cat5e	2014	Rp.1.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
236	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.03.01.004	0001	Meja Kerja 1 Biro	-	2014	Rp.5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
237	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.03.03.005	0001	Kursi Kerja Ess.III	Indachi/D760	2014	Rp.1.975.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
238	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.03.03.005	0002	Kursi Kerja Ess.III	Indachi/D760	2014	Rp.1.975.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
239	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.03.03.005	0003	Kursi Kerja Ess.III	Indachi/D760	2014	Rp.1.975.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
240	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.03.03.005	0004	Kursi Kerja Ess.III	Indachi/D760	2014	Rp.1.975.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
241	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.06.01.01.096	0001	Video Kamera	Sony/NEX VG-30	2015	Rp.28.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
242	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.05.01.02.010	0001	Mesin Absen	-	2015	Rp.6.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
243	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.05.01.04.001	0001	Lemari Besi 2 Pintu	-	2015	Rp.3.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
244	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.05.01.04.001	0002	Lemari Besi 2 Pintu	-	2015	Rp.3.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
245	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.05.01.04.005	0001	Filling Kabinet	-	2015	Rp.2.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
246	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.05.01.04.005	0002	Filling Kabinet	-	2015	Rp.2.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
247	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.05.01.05.077	0001	Media pengumuman	-	2015	Rp.19.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
248	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.05.01.05.088	0001	Meja Kerja	Melamic Series	2015	Rp.11.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
249	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.05.02.06.036	0001	Tangga Alumunium	-	2015	Rp.4.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
250	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0001	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
251	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0002	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
252	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0003	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
253	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0004	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
254	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0005	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
255	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0006	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
256	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0007	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
257	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0008	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
258	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0009	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
259	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0010	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
260	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0011	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
261	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0012	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
262	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0013	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
263	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0014	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
264	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.01.01.008	0015	AP Outdoor	Unifi/AP LR	2015	Rp.1.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
265	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.02.05.001	0001	UPS	ICA/1200VA	2015	Rp.1.975.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
266	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.02.05.001	0002	UPS	ICA/1200VA	2015	Rp.1.975.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
267	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.02.05.001	0003	UPS	ICA/1200VA	2015	Rp.1.975.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
268	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2017	1.3.2.10.02.03.003	0001	Printer	Epson L220 Series	2017	Rp.2.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
269	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.02.04.002	0001	Switch	HP/V1410-16	2015	Rp.1.475.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
270	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.02.04.002	0002	Switch	HP/V1410-16	2015	Rp.1.475.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
271	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.10.02.04.033	0001	Kabel CAT 5	AMP Cable UTP	2015	Rp.1.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
272	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.06.01.02.003	0001	Kamera	XIAOMI	2015	Rp.3.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
273	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2015	1.3.2.06.01.02.003	0002	SLR CAMERA	CANON EOS	2015	Rp.8.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
274	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.05.01.04.003	0001	Rak Server	Indorack	2016	Rp.19.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
275	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.05.02.06.012	0001	Wifi Extender	TP Link RE- 200	2016	Rp.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
276	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.05.02.06.012	0002	Wifi Extender	TP Link RE- 200	2016	Rp.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
277	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.05.02.06.012	0003	Wifi Extender	TP Link RE- 200	2016	Rp.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
278	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.05.02.06.012	0004	Wifi Extender	TP Link RE- 200	2016	Rp.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
279	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.10.02.04.033	0001	Kabel Jaringan	Amp Cat5e	2016	Rp.1.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
280	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.10.02.04.033	0002	Kabel Jaringan	Amp Cat5e	2016	Rp.1.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

281	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.10.02.04.033	0003	Kabel Jaringan	Amp Cat5e	2016	Rp.1.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
282	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.10.02.04.033	0004	Kabel Jaringan	Amp Cat5e	2016	Rp.1.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
283	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.10.02.04.033	0005	Kabel Jaringan	Amp Cat5e	2016	Rp.1.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
284	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.10.02.04.033	0006	Kabel Jaringan	Amp Cat5e	2016	Rp.1.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
285	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.10.02.04.033	0007	Kabel Jaringan	Amp Cat5e	2016	Rp.1.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
286	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.10.02.04.033	0008	Kabel Jaringan	Amp Cat5e	2016	Rp.1.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
287	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2016	1.3.2.10.02.04.033	0009	Kabel Jaringan	Amp Cat5e	2016	Rp.1.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
288	08.09.00.III.14.01.2018	1.3.2.05.02.04.003	0001	AC	-	2018	Rp.14.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
289	08.09.00.III.14.01.2019	1.3.2.05.01.04.001	0001	LEMARI BESI	BROTHER 2 PINTU	2019	Rp.3.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
290	08.09.00.III.14.01.2019	1.3.2.05.01.04.005	0001	FILLING CABINET	BROTHER 4 DRAWER	2019	Rp.2.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
291	08.09.00.III.14.01.2019	1.3.2.05.01.04.005	0002	FILLING CABINET	BROTHER 4 DRAWER	2019	Rp.2.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
292	08.09.00.III.14.01.2019	1.3.2.10.01.02.002	0001	LAPTOP	LAPTOP DELL NB INSPIRON	2019	Rp.4.875.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
293	08.09.00.III.14.01.2019	1.3.2.10.01.02.002	0002	LAPTOP	LAPTOP DELL NB INSPIRON	2019	Rp.4.875.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
294	08.09.00.III.14.01.2019	1.3.2.10.02.03.003	0001	PRINTER	CANON MP287	2019	Rp.1.025.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
295	08.09.00.III.14.02.2019	1.3.2.10.02.03.003	0001	PRINTER	CANON MP287	2019	Rp.1.025.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
296	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.05.02.04.004	0001	AC SPLIT	LG	2019	Rp.7.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
297	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.05.02.04.004	0002	AC SPLIT	LG	2019	Rp.7.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
298	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.05.02.01.050	0001	KURSI OPERATOR	-	2019	Rp.1.891.175,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
299	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.05.02.01.050	0002	KURSI OPERATOR	-	2019	Rp.1.891.175,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
300	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.05.02.01.050	0003	KURSI OPERATOR	-	2019	Rp.1.891.175,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
301	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.05.02.04.004	0001	PENDINGIN RUANGAN	DAIKIN 2PK	2019	Rp.9.035.510,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
302	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.05.02.04.004	0002	PENDINGIN RUANGAN	DAIKIN 2PK	2019	Rp.9.035.510,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
303	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.05.02.06.002	0001	LED TV 50 INCH 4K INCLUD	LG 50UK6300	2019	Rp.12.401.675,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
304	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0001	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC HD	2019	Rp.5.846.511,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
305	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0002	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC HD	2019	Rp.5.846.511,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
306	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0003	CONTROLLER WIRELESS A	UBIQUITI UNIFI CLOUD KEY	2019	Rp.2.486.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
307	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0004	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
308	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0005	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
309	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0006	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
310	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0007	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
311	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0008	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
312	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0009	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
313	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0010	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
314	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0011	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
315	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0012	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
316	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0013	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
317	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0014	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
318	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0015	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
319	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0016	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
320	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0017	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
321	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0018	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
322	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0019	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
323	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0020	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
324	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0021	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
325	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0022	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
326	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0023	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
327	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0024	WIRELESS ACCESS POINT N	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

375	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.01.01.008	0072	WIRELESS ACCESS POINT	UBIQUITI UNIFI AC LR	2019	Rp.2.126.003,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
376	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.05.001	0001	UPS 1U RACKMOUNT	EATON 5P1150iR	2019	Rp.6.673.282,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
377	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.05.001	0002	UPS 1U RACKMOUNT	EATON 5P1150iR	2019	Rp.6.673.282,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
378	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.05.001	0003	UPS 1U RACKMOUNT	EATON 5P1150iR	2019	Rp.6.673.282,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
379	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.05.001	0004	UPS 1U RACKMOUNT	EATON 5P1150iR	2019	Rp.6.673.282,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
380	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.05.001	0005	UPS 1U RACKMOUNT	EATON 5P1150iR	2019	Rp.6.673.282,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
381	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.05.001	0006	UPS 3000VA	APSMC3000RMI2U	2019	Rp.18.602.507,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
382	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.05.001	0007	UPS 3000 VA	APSMC3000RMI2U	2019	Rp.18.602.507,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
383	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.05.001	0008	UPS 1set	-	2019	Rp.400.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
384	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.03.002	0001	PC MONITORING	INTEL NUC 715BNH	2019	Rp.11.220.561,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
385	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.03.003	0001	PRINTER	CANON MP287	2019	Rp.1.025.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
386	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.03.003	0002	PRINTER	CANON MP287	2019	Rp.1.025.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
387	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.002	0001	ROUTER CORE 2 PORT SFP	MIKROTIK CCR1036	2019	Rp.18.484.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
388	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.002	0002	ROUTER DISTRIBUSI	MIKROTIK RB1100Dx4	2019	Rp.5.846.511,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
389	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0001	WALLMOUNT RACK 8U DE	INDORACK	2019	Rp.3.676.849,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
390	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0002	WALLMOUNT RACK 8U DE	INDORACK	2019	Rp.3.676.849,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
391	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0003	WALLMOUNT RACK 8U DE	INDORACK	2019	Rp.3.676.849,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
392	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0004	WALLMOUNT RACK 8U DE	INDORACK	2019	Rp.3.676.849,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
393	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0005	WALLMOUNT RACK 8U DE	INDORACK	2019	Rp.3.676.849,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
394	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0006	PATCH PANEL CAT 5 48 PO	TYCO / AMP	2019	Rp.3.779.556,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
395	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0007	PATCH PANEL CAT 5 48 PO	TYCO / AMP	2019	Rp.3.779.556,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
396	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0008	PATCH PANEL CAT 5 48 PO	TYCO / AMP	2019	Rp.3.779.556,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
397	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0009	PATCH PANEL CAT 5 48 PO	TYCO / AMP	2019	Rp.3.779.556,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
398	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0010	PATCH PANEL CAT 5 48 PO	TYCO / AMP	2019	Rp.3.779.556,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
399	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0011	MANAGEBLE SWITCH 48 P	UBIQUITI EDGESWICHT	2019	Rp.15.236.342,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
400	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0012	MANAGEBLE SWITCH 48 P	UBIQUITI EDGE SWICHT	2019	Rp.15.236.342,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
401	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0013	MANAGEBLE SWITCH 48 P	UBIQUITI EDGE SWICHT	2019	Rp.15.236.342,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
402	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0014	MANAGEBLE SWITCH 48 P	UBIQUITI EDGE SWICHT	2019	Rp.15.236.342,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
403	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0015	MANAGEBLE SWITCH 48 P	UBIQUITI EDGE SWICHT	2019	Rp.15.236.342,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
404	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0016	SWITCHDISTRIBBUSI 16 PC	UBIQUITI EDGE SWICHT ES	2019	Rp.11.633.952,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
405	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0017	SWITCH CORE 2 PORT SFP	UBIQUITI EDGE SWICHT ES	2019	Rp.8.238.252,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
406	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0018	RAK SERVER CLOSE RACK 2	INDORACK	2019	Rp.7.500.064,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
407	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0019	PEKERJAAN INSTALASI FIBI	-	2019	Rp.141.258.634,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
408	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0020	ISTALASI KABEL FO DAN PE	-	2019	Rp.263.774.621,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
409	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0021	SETTING MANAGEMENT P	-	2019	Rp.173.552.489,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
410	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0022	AKSES INTERNET	-	2019	Rp.148.104.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
411	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0023	MAINTENANCE NETWORK	-	2019	Rp.146.790.655,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
412	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0024	SOSIALISASI OPD	-	2019	Rp.59.814.700,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
413	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0025	PELATIHAN ADMIN	-	2019	Rp.29.907.350,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
414	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0026	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
415	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0027	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
416	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0028	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
417	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0029	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
418	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0030	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
419	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0031	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
420	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0032	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
421	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0033	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

469	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0084	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
470	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0085	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
471	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0086	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
472	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0087	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
473	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0088	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
474	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0089	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
475	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0090	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
476	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0091	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
477	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0093	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
478	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0094	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
479	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0095	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
480	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0096	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
481	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0097	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
482	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0099	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
483	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0100	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
484	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0101	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
485	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0102	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
486	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0103	DEKSTOP SWITCH 8 PORT	HP1405-8G	2019	Rp.1.104.422,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
487	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0107	PANEL PDU B	-	2019	Rp.18.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
488	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0108	PANEL PDU A	-	2019	Rp.18.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
489	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0109	PANEL DC	-	2019	Rp.226.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
490	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0110	APAR CLEAN AGENT GAS 3	LIBERTY PROTECT	2019	Rp.2.420.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
491	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0111	APAR CLEAN AGENT GAS 3	LIBERTY PROTECT	2019	Rp.2.420.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
492	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0112	MEJA TESTING	-	2019	Rp.1.399.090,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
493	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0113	MEJA NOC	-	2019	Rp.1.519.265,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
494	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0114	MEJA NOC	-	2019	Rp.1.519.265,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
495	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0115	MEJA NOC	-	2019	Rp.1.519.265,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
496	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0116	RAK SERVER PERFORATED	INDORACK	2019	Rp.18.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
497	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0117	RAK SERVER PERFORATED	INDORACK	2019	Rp.18.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
498	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0118	RAK SERVER PERFORATED	INDORACK	2019	Rp.18.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
499	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0119	RAK SERVER PERFORATED	INDORACK	2019	Rp.18.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
500	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0120	ACCESS CONTROL UNIT	-	2019	Rp.7.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
501	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0121	ACCESS CONTROL UNIT	-	2019	Rp.7.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
502	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0122	ACCESS CONTROL UNIT	-	2019	Rp.7.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
503	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0123	ACCESS CONTROL UNIT	-	2019	Rp.7.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
504	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0124	MAGNETIC DOOR LOCK	-	2019	Rp.1.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
505	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0125	MAGNETIC DOOR LOCK	-	2019	Rp.1.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
506	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0126	MAGNETIC DOOR LOCK	-	2019	Rp.1.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
507	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0128	MAGNETIC DOOR LOCK	-	2019	Rp.1.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
508	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0129	panel utility	-	2019	Rp.16.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
509	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0130	PAC	-	2019	Rp.363.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
510	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0131	PEKERJAAN SIPIL PEMBUA	-	2019	Rp.403.826.948,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
511	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.10.02.04.033	0132	PEKERJAAN INTALASI LISTR	-	2019	Rp.324.502.642,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
512	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.06.01.02.003	0001	CAMERA	CANON EOS M50	2019	Rp.12.446.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
513	08.09.00.III.14.03.2019	1.3.2.06.01.02.045	0001	TRIPOD	MANFROTTO COMPACT LI	2019	Rp.1.077.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
514	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0004	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
515	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0005	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

516	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0006	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
517	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0007	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
518	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0010	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
519	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0011	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
520	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0012	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
521	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.012	0001	WIRELESS MOCROPHONE	SHURE	2020	Rp.12.595.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
522	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.012	0002	WIRELESS PRESENTASION	BENQ INSTASHOW WDC10	2020	Rp.22.990.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
523	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.014	0001	MICROPHONE CONFEREN	CR M4101	2020	Rp.124.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
524	08.09.00.III.14.02.2020	1.3.2.05.02.06.021	0001	LOGITECH RALLY CAMERA	LOGITECH	2020	Rp.26.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
525	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.021	0022	VIDEOWALL CONTROLER	HIKVISION	2020	Rp.339.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
526	08.09.00.III.14.01.2020	1.3.2.05.02.06.048	0001	HANDY CAM	SONY HXR-NX100	2020	Rp.39.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
527	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.03.02.02.006	0001	FIRE SUPPRESSION SYSTEM	SERATO	2020	Rp.501.361.658,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
528	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.077	0001	PENYEKAT RUANGAN	PENYEKAT	2020	Rp.366.024.640,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
529	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0005	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
530	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0004	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
531	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0003	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
532	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0002	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
533	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0006	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
534	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0001	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
535	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0007	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
536	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0008	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
537	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0009	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
538	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0010	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
539	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0011	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
540	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.01.02.001	0012	KOMPUTER / PC	ASUS	2020	Rp.19.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
541	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.02.02.010	0001	COMPUTER SERVER	Intel xeon gold	2020	Rp.199.760.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
542	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.03.02.02.006	0002	ENVIRONMENTAL MONIT	HOCHIKI TIRA	2020	Rp.98.641.125,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
543	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.10.02.04.033	0001	MATERIAL SUPPORT	CABEL,	2020	Rp.1.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
544	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.03.02.013	0001	MEJA OPERATOR	-	2020	Rp.31.510.147,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
545	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.06.01.01.059	0001	POWER AMPLIFIER	APART	2020	Rp.37.312.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
546	08.09.00.III.14.03.2020	1.3.2.06.01.02.126	0001	KAMERA	CANON MIRRORLESS CAM	2020	Rp.14.795.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
547	08.09.00.III.14.01.2020	1.3.2.06.01.02.126	0001	CAMERA SONY	SONY A7	2020	Rp.37.125.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
548	08.09.00.III.14.01.2020	1.3.2.06.01.02.126	0002	CAMERA SONY	SONY A7	2020	Rp.37.125.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
549	08.09.00.III.14.01.2020	1.3.2.06.01.01.096	0001	DRONE SET	DJI MAVIC 2 PRO	2020	Rp.39.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
550	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.06.01.01.096	0002	AUDIO MIXER	WHARFEDALE	2020	Rp.5.104.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
551	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.06.01.01.096	0003	SPEAKER PASIF	APART	2020	Rp.17.050.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
552	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.06.01.01.096	0004	SPEAKER PASIF	APART	2020	Rp.17.050.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
553	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.06.01.01.096	0005	SPEAKER PASIF	APART	2020	Rp.17.050.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
554	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.06.01.01.096	0006	SPEAKER PASIF	APART	2020	Rp.17.050.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
555	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.03.03.08.024	0001	AIR CONDITIONER (PAC)	CITEK	2020	Rp.389.067.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
556	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.01.008	0001	MEJA RAPAT COMMAND	NON MERK	2020	Rp.25.686.712,80	Dinas Komunikasi dan Informatika
557	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.01.030	0002	KURSI OPERATOR (TYPE M	LEX 286	2020	Rp.19.665.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
558	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.01.030	0001	KURSI RAPAT (DIREKTUR)	GOF	2020	Rp.27.956.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
559	08.09.00.III.14.01.2020	1.3.2.05.02.04.004	0001	AC SPLIT	LG	2020	Rp.5.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
560	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.04.004	0001	AC SPLIT	AUX	2020	Rp.6.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
561	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.04.004	0002	AC SPLIT	AUX	2020	Rp.6.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
562	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.04.004	0003	AC SPLIT	AUX	2020	Rp.6.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

563	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.04.004	0004	AC SPLIT	ACUX	2020	Rp.6.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
564	08.09.00.III.14.01.2020	1.3.2.05.02.04.004	0002	AC SPLIT	LG	2020	Rp.7.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
565	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0008	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
566	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0009	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
567	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0001	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
568	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0002	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
569	08.09.00.III.14.04.2020	1.3.2.05.02.06.002	0003	TELEVISI LED VIDEO WALL	SAMSUNG LED WALL	2020	Rp.104.499.936,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
570	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2014	1.3.2.05.02.01.050	0001	Lemari	-	2014	Rp.520.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
571	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2008	1.3.2.10.01.01.008	0001	Jaringan Komputer	-	2008	Rp.82.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
572	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.05.01.04.001	0001	Lemari 2 Pintu	Brother	2011	Rp.3.050.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
573	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.05.01.04.005	0001	Filling Cabinet	LION	2011	Rp.4.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
574	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.10.01.02.010	0008	Maintenance	no	2011	Rp.1.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
575	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.10.01.02.010	0009	Maintenance	no	2011	Rp.1.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
576	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.10.01.02.010	0010	Maintenance	no	2011	Rp.1.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
577	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.10.02.03.018	0001	Setup	no	2011	Rp.1.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
578	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.10.02.03.018	0002	Setup	no	2011	Rp.1.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
579	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.10.02.03.018	0003	Setup	no	2011	Rp.1.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
580	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.10.02.04.001	0001	SERVER	-	2011	Rp.13.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
581	08.09.III.14.00000.00000.XXXX.2011	1.3.2.10.02.04.002	0001	Roter	Mikrotik	2011	Rp.2.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
582	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0001	KAMERA CCTV	UNIARCH 2MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
583	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0003	KAMERA CCTV	UNIARCH 2 MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
584	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0002	KAMERA CCTV	UNIARCH 2 MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
585	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0004	KAMERA CCTV	UNIARCH 2 MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
586	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.03.23.015	0002	ROUTER MIKROTIK	ROUTER	2021	Rp.4.727.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
587	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0005	KAMERA CCTV	UNIARCH 2 MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
588	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0006	KAMERA CCTV	UNIARCH 2MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
589	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0007	KAMERA CCTV	UNIARCH 2 MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
590	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0008	KAMERA CCTV	UNIARCH 2MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
591	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0009	KAMERA CCTV	UNIARCH 2MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
592	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0010	KAMERA CCTV	UNIARCH 2MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
593	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0011	KAMERA CCTV	UNIARCH 2MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
594	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0012	KAMERA CCTV	UNIARCH 2 MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
595	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0013	KAMERA CCTV	UNIARCH 2 MP	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
596	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0014	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
597	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0015	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
598	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0016	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
599	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0017	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
600	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0018	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
601	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0019	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
602	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0020	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
603	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0021	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
604	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0022	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
605	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0023	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
606	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0024	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
607	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0025	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
608	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0026	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
609	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0038	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

610	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0027	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
611	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0028	KAMERA CCTV	UNIARCH	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
612	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0029	KAMERA CCTV	HIXVISION	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
613	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0030	KAMERA CCTV	HIXVISION	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
614	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0031	KAMERA CCTV	HIXVISION	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
615	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0032	KAMERA CCTV	HIXVISION	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
616	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0033	KAMERA CCTV	HIXVISION	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
617	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0034	KAMERA CCTV	HIXVISION	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
618	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0035	KAMERA CCTV	HIXVISION	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
619	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0036	KAMERA CCTV	HIXVISION	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
620	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.096	0037	KAMERA CCTV	HIXVISION	2021	Rp.3.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
621	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.03.23.015	0001	LOEWIX POE SWITCH	16 PORT	2021	Rp.3.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
622	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.02.038	0001	POWER SUPLAY	OSKA	2021	Rp.1.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
623	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.06.001	0001	Hard Disk	SEAGATE	2021	Rp.2.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
624	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.06.001	0002	RECORD	NVR DAHUA	2021	Rp.5.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
625	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.06.001	0003	RECORD	VR HIXVISION HQHK11	2021	Rp.4.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
626	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.06.001	0001	HARD DISK	SEAGATE	2021	Rp.2.725.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
627	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.008	0002	TV SMART	SHARP	2021	Rp.9.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
628	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.01.008	0001	TV SMART	SHARP	2021	Rp.9.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
629	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.01.02.038	0002	POWER SUPLAY	OSKA	2021	Rp.1.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
630	08.09.00.III.14.04.2021	1.3.2.06.03.23.015	0003	ROUTER MIKROTIK	ROUTER	2021	Rp.4.727.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
631	08.09.00.III.14.04.2022	1.3.2.06.01.05.047	0001	Drone	dji drone Mavic mini	2022	Rp.12.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
632	08.09.00.III.14.04.2022	1.3.2.05.02.06.048	0001	Handy cam	Sony	2022	Rp.29.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
633	08.09.00.III.14.04.2022	1.3.2.06.01.02.126	0001	Kamera	Nikon	2022	Rp.20.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
634	08.09.00.III.14.04.2022	1.3.2.06.01.02.061	0001	Lensa Kamera	Panasonic Lumic DMC	2022	Rp.10.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
635	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.05.03.01.005	0001	Meja Kerja Biro	OST 1080	2022	Rp.4.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
636	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.05.03.01.005	0002	Meja Kerja Biro	OST 1080	2022	Rp.4.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
637	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.05.03.01.005	0003	Meja Kerja Biro	OST 1080	2022	Rp.4.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
638	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.05.03.03.004	0001	Kursi Kerja 1 Biro	Indachi Inco Aeron	2022	Rp.2.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
639	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.05.03.03.004	0002	Kursi Kerja 1 Biro	Indachi Inco Aeron	2022	Rp.2.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
640	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.05.03.03.004	0003	Kursi Kerja 1 Biro	Indachi Inco Aeron	2022	Rp.2.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
641	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.01.007	0001	PodCast Mixer	Rode Caster Pro	2022	Rp.19.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
642	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.01.007	0002	PodCast Mixer	Rode Caster Pro	2022	Rp.19.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
643	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.01.037	0001	PodCast Micropone	Rode Podmic	2022	Rp.6.333.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
644	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.01.037	0002	PodCast Micropone	Rode Podmic	2022	Rp.6.333.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
645	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.01.037	0003	PodCast Micropone	Rode Podmic	2022	Rp.6.333.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
646	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.01.037	0004	PodCast Micropone	Rode Podmic	2022	Rp.6.333.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
647	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.02.116	0001	Headphones	Sennheiser HD06	2022	Rp.1.295.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
648	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.02.116	0002	Headphones	Sennheiser HD06	2022	Rp.1.295.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
649	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.02.116	0003	Headphones	Sennheiser HD06	2022	Rp.1.295.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
650	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.02.116	0004	Headphones	Sennheiser HD06	2022	Rp.1.295.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
651	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.02.016	0001	Video Switcer	Black Magic Atem Mini Pro	2022	Rp.20.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
652	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.02.016	0002	Video Switcer	Black Magic Atem Mini Pro	2022	Rp.20.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
653	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.02.126	0001	Kamera	Sony Alpha A6400 KIT(16-5	2022	Rp.29.277.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
654	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.02.126	0002	Kamera	Sony Alpha A6400 KIT(16-5	2022	Rp.29.277.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
655	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.02.055	0001	Softbox	Godox	2022	Rp.4.814.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
656	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.06.01.02.055	0002	Softbox	Godox	2022	Rp.4.814.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

704	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.05.02.04.004	0003	AC	Panasonic	2022	Rp.5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
705	08.09.00.III.14.01.2022	1.3.2.05.02.04.004	0004	AC	Panasonic	2022	Rp.5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
706	08.09.00.III.14.02.2022	1.3.2.06.02.08.024	0001	Switch POE 16 Port	D-link	2022	Rp.6.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
707	08.09.00.III.14.02.2022	1.3.2.06.02.08.024	0001	Switch POE 16 Port	D-link	2022	Rp.5.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
708	08.09.00.III.14.04.2022	1.3.2.06.01.01.035	0001	Monitor Speaker	Edifier R1280T	2022	Rp.2.525.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
709	08.09.00.III.14.04.2022	1.3.2.05.02.01.041	0001	Sekat Ruang	dibuat sesuai pesanan	2022	Rp.150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
710	08.09.00.III.14.04.2022	1.3.2.05.01.05.002	0002	CCTV	Radio Microtic LHG	2022	Rp.4.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
711	08.09.00.III.14.04.2022	1.3.2.05.01.05.002	0001	CCTV	DVR Dahua	2022	Rp.14.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
712	08.09.00.III.14.04.2022	1.3.2.05.01.05.002	0001	CCTV	Radio Microtic LHG	2022	Rp.4.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
713	08.09.00.III.14.02.2022	1.3.2.06.02.08.024	0002	Switch POE 16 Port	D-link	2022	Rp.5.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IKU										
1.KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase Informasi Penyeleenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95	95	95	95	95	95	95	95
2	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	80	80	85	85	90	100	100	100
3	Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik	Persen	90	90	95	95	95	95	95	95
2.STATISTIK										
4	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan baik	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IKK										
1.PERSANDIAN										
1	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang baik	Persen	80	85	95	95	95	95	95	95

TABEL TC 33
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDAR LAMPUNG
RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 DAN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Renja Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(1)	(2)	(7)	(8)	(13)	(14)	(15)	(14)	(15)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.280.019.593,00			9.280.019.593,00		9.744.020.572,65
#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.205.019.593,00			9.120.019.593,00		9.576.020.572,65
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	4.516.174.593,00		100%	4.486.141.604,00	100%	4.710.448.684,20
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	3 Dokumen	19.850.000,00		100%	22.000.000,00	100%	23.100.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja, RKA dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	3 Dokumen	9.925.000,00		3 Dokumen	11.000.000,00	3 Dokumen	11.550.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, LPJ, LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	3 Dokumen	9.925.000,00		3 Dokumen	11.000.000,00	3 Dokumen	11.550.000,00
	Administrasi Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD tepat waktu	100%	3.598.824.593,00		100%	3.596.174.593,00	100%	3.775.983.322,65
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.475.174.593,00		100%	3.475.174.593,00	100%	3.648.933.322,65
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	111.000.000,00		12 Bulan	111.000.000,00	12 Bulan	116.550.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	12.650.000,00		1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	1 Ls	10.000.000,00		1 Ls	10.000.000,00	1 Ls	10.500.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	10.000.000,00		1 Ls	10.000.000,00	1 Ls	10.500.000,00
	Administrasi Umum	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD	100%	140.000.000,00		100%	110.467.011,00	100%	115.990.361,55
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	%	20.000.000,00		12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	15.750.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	%	10.000.000,00		12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	10.500.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Makanan dan Minuman	%	30.000.000,00		12 Bulan	20.467.011,00	12 Bulan	21.490.361,55
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	%	9.000.000,00		12 Bulan	9.000.000,00	12 Bulan	9.450.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	%	6.000.000,00		12 Bulan	6.000.000,00	12 Bulan	6.300.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	%	65.000.000,00		1 Ls	50.000.000,00	1 Ls	52.500.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-		100%	-	100%	-
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-		100%	-	100%	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	698.000.000,00		12 Bulan	698.000.000,00	12 Bulan	732.900.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	2.000.000,00		12 Bulan	2.000.000,00	12 Bulan	2.100.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	696.000.000,00		12 Bulan	696.000.000,00	12 Bulan	730.800.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	49.500.000,00		100%	49.500.000,00	100%	51.975.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	29.400.000,00		12 Bulan	29.400.000,00	12 Bulan	30.870.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	17.600.000,00		12 Bulan	17.600.000,00	12 Bulan	18.480.000,00

naik 5%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	2.500.000,00		12 Bulan	2.500.000,00	12 Bulan	2.625.000,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	-		12 Bulan	-	12 Bulan	-
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	-			-		-
PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik	%	2.880.845.000,00		100%	2.848.845.000,00	100%	2.991.287.250,00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1. Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung 2. Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID 4. Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah	12 Bulan	2.880.845.000,00		100%	2.848.845.000,00	100%	2.991.287.250,00
Pengelolaan Media Komunikasi publik	Tersusunnya Informasi Layak Anak (ILA) Kota Bandar Lampung	12 Bulan	-		1 Tahun	-	1 Tahun	-
Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Paket	1.248.500.000,00		1 Paket	1.248.500.000,00	1 Paket	1.310.925.000,00
Penguatan Kapasitas Kawasan Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Media Center dan Pelayanan PPID	12 Bulan	47.000.000,00		12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	15.750.000,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1 Paket	1.585.345.000,00		1 Tahun	1.585.345.000,00	1 Tahun	1.664.612.250,00
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi Egovernment yang mendukung Smart City dan layanan publik yang berfungsi baik	%	1.808.000.000,00		12 Bulan	1.785.032.989,00	12 Bulan	1.874.284.638,45
Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Koneksi jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	1 Ls	1.525.032.989,00		1 Ls	1.525.032.989,00	1 Ls	1.601.284.638,45
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	1 Ls	1.525.032.989,00		1 Ls	1.525.032.989,00	1 Ls	1.601.284.638,45
Pengelolaan e government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1. Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL) 2. Terbetuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 3. Tersedianya Pengkajian dan Penelitian Sistem Keamanan Data		282.967.011,00			260.000.000,00		273.000.000,00
Penatalaksanaan dan Pengawasan e government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Hosting dan Maintenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTEL)	1 Ls	160.000.000,00		1 Ls	160.000.000,00	1 Ls	168.000.000,00
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terbetuknya Pengembangan dan Pengelolaan Data Center	12 Bulan	122.967.011,00		12 Bulan	100.000.000,00	12 Bulan	105.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			75.000.000,00		100%	115.000.000,00	100%	120.750.000,00
Program Penyelenggaraan Stastistik Sektoral	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada	75.000.000,00		100%	115.000.000,00	100%	120.750.000,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	1. Terevaluasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung 2. Terbetuknya Operasional Literasi Data dan Informasi 3. Tersedianya Penyusunan Data Sektoral 4. Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik	ada	75.000.000,00		100%	115.000.000,00	100%	120.750.000,00
Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Ada	-		1 Tahun	15.000.000,00	1 Tahun	15.750.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Tersedianya Literasi Data dan Informasi	Ada	-		1 Ls	15.000.000,00	1 Ls	15.750.000,00
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Data Sektoral	Ada	75.000.000,00		1 Tahun	75.000.000,00	1 Tahun	78.750.000,00

Pembangunan Infrastruktur	Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Data Elektronik	Ada	-	12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	10.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			-	100%	45.000.000,00	100%	47.250.000,00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara baik	%	-	100%	45.000.000,00	100%	47.250.000,00
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran 2. Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung 3. Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian	%	-	100%	45.000.000,00	100%	47.250.000,00
Penetapan Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Postelsus dan Penyiaran	%	-	1 Tahun	15.000.000,00	1 Tahun	15.750.000,00
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bandar Lampung	%	-	1 Tahun	15.000.000,00	1 Tahun	15.750.000,00
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Persandian	%	-	1 Tahun	15.000.000,00	1 Tahun	15.750.000,00
			9.280.019.593,00		9.280.019.593,00		9.744.020.572,65

Matrik Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kebijakan (Secara Keseluruhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan	target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	Pagu (Rp)
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel, Transparansi dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbangunnya Infrastruktur Telekomunikasi Terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	95%	5.178.180.428,00
					2. Terbangunnya Infrastruktur Jaringan Serat Optik dalam Gedung, Antar Gedung dan dalam Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98%	95%	60.000.000,00
					Tersedianya Akses Informasi Melalui Internet di Setiap SKPD di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00
					4. Tersedianya Akses Internet Gratis Bagi Publik	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00
					5. Tersedianya Pusat Data dan Informasi (Data Center)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	98%	95%	3.677.869.004,00
					6. Tersedianya Pusat Monitoring dan Kendali (Command Center)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	3.441.519.004,00
					Tersedianya Sistem Administrasi Lesspaper Dalam Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	206.350.000,00
					8. Tersedianya Sistem Komunikasi Berbasis TIK Seperti E-Mail, Mobile Instant Messenger dll.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir OPD	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00
					9. Meningkatkan Ketersediaan Website SKPD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98%	95%	45.000.000,00
					10. Pengaturan Domain dan Subdomain	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya Jumlah Pegawai yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000,00
					11. Tersedianya Sistem Informasi Berbasis	Kegiatan Administrasi	Terlaksananya Pemenuhan	98%	95%	245.817.500,00

					TIK untuk Pelayanan Publik.	Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Inventaris Kantor			
				12	Tersedianya Sistem Monitoring Kota dengan Pemanfaatan TIK	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.777.000,00
				13	Tersedianya Sistem Informasi berbasis TIK yang dapat Menunjang Pelayanan Publik	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	9.339.500,00
				14	Tersedianya Sistem Informasi Terpadu Tentang Kota Bandar Lampung	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat	12 Bulan	12 Bulan	96.206.000,00
				15	Tersedianya Database yang Lengkap Tentang Potensi Daerah di Berbagai sektor (Pariwisata, Jasa dan Perdagangan)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	22.720.000,00
				16	Tumbuhnya Ekonomi Kreatif di Bidang Komunikasi dan Informatika	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00
				17	Mendorong Pengembangan E- Commerce	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	80.775.000,00
					Tersedianya Sistem Informasi yang dapat Mendorong Peningkatan PAD	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%	125.000.000,00
				19	Peningkatan Metode kerja Pengelolaan Informasi di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Jumlah Mebel	12 Bulan	12 Bulan	125.000.000,00
				20	Tersusunnya Pola Pengelolaan Data dan Informasi yang Aman, Efektif dan Efisien					
				21	Terjalinnnya Kemitraan Mutualisme dengan Media Massa dalam Diseminasi Informasi	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	12 Bulan	12 Bulan	879.000.000,00
				22	Tersedianya Konten Informasi Pembangunan Daerah Baik dalam Format Digital Atau Cetak (Teks, Gambar dan Video)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000,00
				23	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Media Informasi Publik (Elektronik, Luar Ruang, Cetak dan Online)	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	877.000.000,00
				24	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor	98%	95%	145.493.924,00
				25	Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi yang Handal	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	40.550.000,00

						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
					26	Tersedianya Regulasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasi Sesuai Peraturan Perundangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	23.000.000,00
					27	Terjalinnya Kemitraan Strategis dengan Para Penyelenggara Layanan Dibiidang Pos dan Telekomunikasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000
					28	Terlaksananya Edukasi Terkait Penyelenggaraan Layananpos dan Telekomunikasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	59.443.924,00
							Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Pendukung Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000,00
		Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	gkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	29	Terbangunnya Pusat Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	100%	100%	5.630.975.100,00
					30	Terlaksananya Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Keahlian ASN	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	100%	5.630.975.100,00
						Terlaksananya Sosialisasi Dan edukasi Tentang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Teknologi	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	36.,000.000,00
							Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	12 Bulan	12 Bulan	2.273.712.000,00
							Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.221.263.100,00

							PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	85%	70%	4.702.977.870,00
								Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	95%	90%	
							Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	95%	90%	3.338.455.870,00
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	12 Bulan	12 Bulan	3.338.455.870,00
							Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	95%	12%	1.364.522.000,00
							Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	156.422.000,00
							Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Jumlah Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	1.208.100.000,00
						URUSAN STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada	277.500.000,00
							Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada	277.500.000,00
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terintegrasinya Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	66.600.000,00
							Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang	Terlakssanya Operasional Literasi Data dan Informas	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00

							Terintegrasi				
							Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Sektoral	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000,00
							Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Terpeliharanya Jumlah Infrastruktur Data dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	22.500.000,00
	URUSAN PERSANDIAN						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Informasi Daerah Ynag Terselenggara Baik	95%	90%	477.078.000,00
							Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	95%	90%	477.078.000,00
							Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemaan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota yang Terkelola dengan Baik	95%	90%	40.000.000,00
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pengebangan dan Pengelolaan Call Center dan Web Site	12 Bulan	12 Bulan	334.500.000,00
							Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Call Center dan Persandian untuk Keamanan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	102.578.000,00
TOTAL											16.266.711.398,00

					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	9.339.500,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Layanan Makan dan Minum Rapat	12 Bulan	12 Bulan	29.206.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	22.720.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	67.900.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	95%	50.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Jumlah Mebel	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	12 Bulan	12 Bulan	489.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	487.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Inventaris Kantor	98%	95%	138.476.012,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	33.532.088,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	23.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Pendukung Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	59.443.924,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
		Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien, Akuntabel Transparansi dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	100%	100%	3.701.894.900,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT Dan Bidang I Informasi Dan Komunikasi Publik Dan Bidang li Pemberdayaan E-Government
					Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	100%	100%	3.701.894.900,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bidang I Informasi Dan Komunikasi Publik Dan Bidang li Pemberdayaan E-Government

					Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT
					Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Dikelola Secara Terpadu	12 Bulan	12 Bulan	1.786.712.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT dan Bidang I Informasi dan Komunikasi Publik
					Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi yang Ditempatkan Kepada Masyarakat Melalui PPID dan Website	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT dan Bidang I Informasi dan Komunikasi Publik
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.779.182.900,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SEKRETARIAT dan Bidang I Informasi dan Komunikasi Publik
					PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi IT dan Aplikasi E-Government yang Mendukung Smart City dan Layanan Publik yang Berfungsi Baik	85%	70%	1.732.422.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bidang li Pemberdayaan E-Government dan Bidang III Persandian, Pos dan Telekomunikasi
						Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	95%	90%		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
					Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koneksi Jaringan Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	95%	90%	1.145.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bidang li Pemberdayaan E-Government dan Bidang III Persandian, Pos dan Telekomunikasi
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Koneksi Internet Lingkup Sekretariat Pemkot dan Area Publik	12 Bulan	12 Bulan	1.145.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bidang li Pemberdayaan E-Government
					Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Hosting dan Maitenance Sistem Informasi Pengedalian Menara Telekomunikasi (SIDALMENTAL)	95%	12%	587.422.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bidang III Persandian, Pos dan Telekomunikasi
					Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terawasi Jumlah Menara Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	156.422.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bidang III Persandian, Pos dan Telekomunikasi
					Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terintegrasinya Jumlah Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	431.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bidang li Pemberdayaan E-Government
	URUSAN STATISTIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersusunnya dengan Baiknya Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada	277.500.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bidang IV Statistik Dan Data Elektronik
					Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Data Statistik	Ada	Ada	277.500.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bidang IV Statistik dan Data Elektronik
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan	Terintegrasinya Jenis Data Base	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000,00	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bidang IV Statistik dan Data Elektronik

